DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI PERTANIAN RI

Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke-	:	2
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Senin, 26 Agustus 2024
Waktu	:	Pukul 10.50 s.d. 13.25 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Ketua Rapat	:	Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/Fraksi PDI Perjuangan) Didampingi oleh: 1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/Fraksi Partai Gerindra); 2. Dr. Hj. Anggia Erma Rini, M.K.M. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
Acara	:	1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2023; 2. RKA K/L Tahun 2025 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi); 3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari komisi; serta 4. Isu-isu aktual lainnya.
Sekretaris Rapat	:	Ulfa Nurfajar, S.E., M.A.B. (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	**A. Anggota DPR RI:** 19 dari 53 orang Anggota dengan rincian: **1. Fraksi PDI Perjuangan** 2 dari 12 orang Anggota

1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
2) Maria Lestari, S.Pd.

2. Fraksi Partai Golongan Karya
3 dari 8 orang Anggota
1) Firman Soebagyo, S.E.,M.H.
2) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
3) Teti Rohatingsih, S.Sos

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6 dari 7 orang Anggota
1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
2) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
3) Ir. H. T.A. Khalid, M.M.
4) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
5) Dr. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
6) Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
0 dari 5 orang Anggota

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
1 dari 5 orang Anggota
1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI.

6. Fraksi Partai Demokrat
0 dari 5 orang Anggota

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
4 dari 5 orang Anggota
1) Drh. H. Slamet
2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.
3) Dr. Hermanto, S.E., M.M.
4) Saadiah Uluputty, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 4 orang Anggota
1) Dr. H. Muhammad Syafrudin, ST., M.M.
2) Haerudin, S.Ag., M.H.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 hadir dari 2 orang Anggota

B. Pimpinan/Anggota Izin

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
   1. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si

2. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
   1) K.H. Asep A. Maoshul Affandy, S.Sy.

C. Pemerintah

1. Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, M.P. (Menteri Pertanian RI);
2. Sudaryono (Wakil Menteri Pertanian RI);
3. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Plt. Sekretaris Jenderal Kementan RI);
4. drh. Agung Suganda, M.Si. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan);
5. Andi Nur Alam Syah, S.T.P., M.T. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian);
6. Prof. Dr. Ir. Fadjry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);
7. Dr. Idha Widi Arsanti, S.P., M.P. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian);
8. Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si. (Plt. Direktur Jenderal Hortikultura);
9. Heru Tri Widarto, S.Si., M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Perkebunan);
10. Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional) beserta jajaran;
11. Bayu Krisnamurthi (Direktur Utama Perum BULOG) beserta jajaran;
12. Rahmad Pribadi (Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaan;
13. Sis Apik Wijayanto (Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD beserta anak perusahaan.

Jalannya Rapat:

F-PDIP (KETUA RAPAT/ SUDIN S.E.):

Bisa kita mulai?
Bisa kita mulai?

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Pertanian, hari ini didampingi dengan Wamentan beserta jajaran,
Yang terhormat Kepala Badan Pangan Nasional,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog,
Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Persero,
Yang terhormat Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia,
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini marilah kita banyakan puji dan syukur kehadirat *Allah Subhanahu wa ta'ala,* Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan rapat kerja dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 27 Mei 2024 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 19 Agustus 2024, pada hari ini Senin, 25 Agustus 2024, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian menghadirkan yang seperti saya sebutkan tadi di atas dalam rangka membahas:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2023;
2. RKA Kementerian Pertanian Tahun 2025 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi);
3. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dan kepentingan masyarakat daerah;
4. isu-isu aktual lainnya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) tentang Tata Tertib, rapat ini kami nyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

(RAPAT DIMULAI PUKUL 10.52 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA DAN DIBUKA UNTUK UMUM)

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 10.35 WIB dan akan diakhiri pada pukul 13.35 WIB. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama, dengan acara sebagainya berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;

2. Penjelasan Menteri Pertanian;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Pertanian;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat setujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas Komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan tentang Tata Tertib antara lain mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN. Selanjutnya dalam Pasal 173 ayat (5) disebutkan bahwa Badan Anggaran melakukan pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBN salah satunya dengan mempertimbangkan keputusan rapat kerja antara Komisi dan Pemerintah. Terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN, berdasarkan Ketentuan Pasal 170 Ayat (1), Komisi melakukan rapat kerja dengan Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran untuk program dan kegiatan kementerian lembaga dan hasil pembahasan disampaikan kepada Badan Anggaran secara tertulis.

Perlu kami bahwa sampaikan bahwa rapat kerja hari ini adalah berdasarkan Surat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor B/6347/AG05.01./06/2024 tanggal 10 Juni 2024 mengenai Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-undang dan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Pembahasan Rencana Undang-Undang tentang APBN Tahun 2025.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Mengacu kepada hasil Laporan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023 oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP. Sehubungan dengan hasil tersebut, Komisi IV meminta penjelasan Menteri Pertanian mengenai laporan hasil pemeriksaan tersebut. Selanjutnya Komisi IV juga meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik dari tahun yang lalu hingga mendapatkan WTP. Tantangan perekonomian tahun 2025 mendatang masih akan diliputi ketidakpastian, utamanya bersumber dari dinamika perekonomian global antara lain tekanan deflasi ekonomi China dan juga kondisi politik di beberapa negara. Secara umum, *outlook* perekonomian domestik ke depan diperkirakan masih lemah seiring dengan ketidakpastian global yang masih tinggi hal ini juga dapat pengaruh pada pembangunan sektor pertanian, utamanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan stabilitas harga hingga hilirisasi untuk mendukung peningkatan devisa negara.

Komisi IV berharap sektor pertanian Indonesia akan tumbuh menguat pada tahun 2025 dengan Bapak Presiden yang baru. Komisi IV menilai

menyusun kebijakan dapat mempertimbangkan peningkatan pemanfaatan teknologi dan dorongan terhadap komersialisasi pertanian yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Penyediaan bahan makanan untuk memenuhi permintaan domestik akan menjadi fokus utama apalagi program Presiden yang akan datang tentang makan siang untuk anak sekolah, peningkatan gizi. Melalui penyediaan infrastruktur pertanian yang memadai sehingga sektor pertanian Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Adapun pagu anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan sebesar 7,91 triliun. Ini rasanya kalau dengan anggaran segini mustahil apa yang diharapkan, apa yang dicita-citakan, apa yang dituju jauh dari harapan karena yang lalu saja dengan hampir Rp14 triliun, kita masih ada kekurangan.

Dengan rincian anggaran per program adalah sebagai berikut:

1. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas 2,73 triliun;
2. Program nilai tambah dan daya saing industri 1,61 triliun;
3. Ppendidikan dan perhatian vokasip658 miliar;
4. Program dukungan manajemen 2,9 triliun.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi IV meminta Menteri Pertanian untuk memberikan penjelasan secara global nanti secara terinci detail dan lain-lainnya akan kita bahas pada rapat dengar pendapat dengan Eselon I.

Komisi IV juga meminta kebijakan yang disusun diarahkan dan diperkuat secara berkualitas dan lebih efisien. Kebijakan dapat ditempuh melalui efisiensi belanja non-prioritas, penguatan belanja, produktivitas efektivitas subsidi dan bantuan pemerintah melalui peningkatan akurasi data. Perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi antar program yang relevan. Kebijakan yang disusun harus difokus kepada program-program prioritas yang sifatnya mendorong pertumbuhan ekonomi petani, peternak hingga pekebun rakyat serta fokus kepada produktivitas.

Jadi Pak Menteri, kemarin kami kunjungan kerja ke Bali, ada satu hal yang disampaikan oleh petani di sana. Kami banyak sekali diberikan bantuan Alsintan. Kalau Alsintan bisa sewa, yang kami harapkan itu adalah irigasi tersier yang tidak bisa disewa. Dan, ini langsung saya menjadi terpikir bagaimana supaya perbaikan irigasi-irigasi tersier sekunder maupun primer itu harus lebih difokuskan lebih dipercepat Pak Menteri karena mereka bilang sebaik apapun bibit benih tapi kalau kalau..., kalau airnya tidak ada sama juga bohong itu.

Demikian pengantar disampaikan, selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Pertanian untuk menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut di atas. Kami persilakan.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Kepala Badan Pangan Nasional,
Yang kami hormati Direktur Utama Perum Bulog,
Yang kami hormati Direktur Utama PT Pupuk Indonesia,
Yang kami hormati PT Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia,
Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt.

F-PKS (drh. SLAMET):

Pak Ketua, interupsi sedikit. Mohon maaf Pak Menteri. Ya saya melihat wajah yang di depan ini banyak yang baru Pak Ketua, jadi....

F-PDIP (KETUA RAPAT/ SUDIN S.E.):

Ya ya sebentar Pak Slamet saya jelaskan.

F-PKS (drh. SLAMET):

Yang lama hanya sedikit, mungkin perlu diperkenalkan sebelum masuk.

Terima kasih

F-PDIP (KETUA RAPAT/ SUDIN S.E.):

Saya saya yang salah. Pak Menteri, silakan diperkenalkan para Eselon I ya termasuk juga yang sebelahnya baju putih. Kalau putih sama putih biasanya pangkatnya sama lah, beda sedikit saja. Juga satu ada surat kuasa dari Sekjen tidak bisa hadir karena ada kepentingan eh Irjen, Irjen tidak bisa hadir jadi memberikan kuasa kepada Tim Latifah SP Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Jadi Pak Sekjen, eh Pak Irjennya tidak hadir karena ada kepentingan. Ya Pak Menteri silakan.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih banyak. Ini kami yang minta maaf lupa saking kencangnya karena Pak Ketua tadi Pak, kalau bisa cepat-cepat saja oh iya siap Pak Ketua. Saya perkenalkan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia dari Partai Gerindra Pak, Ketua DPD Jawa Tengah. Kemudian, PLT Sekjen silakan berdiri Pak. Ini Pak Ali Djamil ya Pak ya, wajah

lama jabatan baru. Dirjen PSP yang baru Pak Andi Nur Alam, kemudian Dirjen Peternakan, Pak Agung. Pak Dirjen BSIP, ini Pak Prof. Fajri masih seperti yang dulu. Dirjen eh Kepala Badan BPSDMP, Ibu Santi. Kemudian Staf Ahli, mana staf ahli, Pak Suwandi. Di izin di lapangan Staf Ahli Pak Priasto, mana tadi, ke lapangan juga. Kemudian Kepala Badan Pangan, Pak Arief masih tetap. Dirjen Tanaman Pangan, izin Pak Ketua, Dirjen Tanaman Pangan tadi ada rapat dengan Menko Pak, Menko enggak bisa ditinggalkan Pak Yudi, Pak Yudi, Yudi Sastro. Kemudian Pak Irjen Pak Setyo tadi minta izin ikut pengarahan ada tes ikut ujian.

Sekian Pak Slamet, sekian Pak Ketua, kami lanjut. Terima kasih.

Kami ulangi dari awal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita berkesempatan hadir pada acara rapat kerja hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Saya dan segenap jajaran Kementerian Pertanian mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI atas undangannya rapat kerja hari ini Senin, 26 Agustus 2024 dengan agenda:

1. Membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
2. Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025;
3. Usulan program yang akan didanai DAK berdasarkan kriteria teknis dan dari Komisi IV,
4. Isu-isu aktual lainnya.

Bapak Pimpinan, Anggota dan Wakil Pimpinan serta Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Sebagai agenda pertama kami akan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 yang sudah disusun dan disajikan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat. Realisasi pendapatan selama tahun 2023 mencapai 688,23 miliar atau 126,15% dari target pendapatan dan menurun 17,94 miliar atau 2,54% dibanding tahun 2022. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan karena, satu, menurunnya pendapatan hasil kerja sama BLU, menurunnya pendapatan pendidikan, budaya, riset dan teknologi, menurunnya pendapatan denda dan kerugian negara, menurunnya penerimaan kembali belanja atas tahun anggaran sebelumnya sementara realisasi belanja Kementerian Pertanian tahun 2023 sebesar 14,31 triliun atau 96,67% dan lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2022 yang sebesar 95,15%.

Dalam laporan perubahan ekuitas, kami akan sampaikan ekuitas awal pada 1 Januari 2023 sebesar 81,13 triliun dengan mempertimbangkan defisit laporan operasional koreksi atas ekuitas serta transaksi antara entitas, maka ekuitas akhir Kementerian Pertanian per 31 Desember 2023 sebesar 80,52 triliun. Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun 2023 secara rinci kami sajikan seperti pada bahan yang telah kami sampaikan kepada Pimpinan dan

Anggota Komisi IV DPR RI.

Pada catatan laporan keuangan dapat disampaikan sebagai berikut: 1. Kementerian Pertanian menerima alokasi pagu anggaran awal 2023 APBN sebesar 15,32 triliun dan selama periode berjalan Kementan telah melakukan revisi DIPA akibat adanya perubahan kebijakan, kebutuhan, dan lainnya sehingga dalam laporan keuangan tahun 2023 jumlah pagu anggaran yang tercatat sebesar Rp14,81 triliun; 2. Perubahan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Badan Karantina Pertanian berdampak pada perubahan organisasi nomenklatur perubahan alokasi anggaran, perubahan aset SDM, dan BMN; 3. Sudah dilakukan pelimpahan aset BKP kepada Badan Pangan Nasional sebesar 71,74 miliar; 4. Status BMN Badan Karantina Pertanian saat ini masih dalam proses penetapan status penggunaan sebelum diserahkan kepada Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian dengan terhadap Kementerian Pertanian.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Sebagai agenda kedua, kami akan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2025. Pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan 17 agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2025 sampai 2029 yang dikenal dengan Indonesia Emas. Kementerian Pertanian mendukung langsung pada pelaksanaan yaitu Iptek Indonesia Emas 4, yaitu Iptek, Inovasi, Produktivitas Ekonomi dan Indonesia Emas 16, yaitu Ketahanan Energi, Air, Kemandirian Pangan. Dalam rangka mendukung Indonesia Emas 4 dan Indonesia Emas 16 tersebut, Kementerian Pertanian akan menjabarkan pada empat program, yaitu Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah, Daya Saing Industri, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Dukungan Manajemen.

Pelaksanaan empat program tersebut akan dilaksanakan dengan mengedepankan penguatan dan implementasi redesain sistem perencanaan dan penganggaran, di mana kegiatan pendukung yang dilakukan oleh Eselon I non-komoditas akan mengikuti terintegrasi dengan kegiatan utama yang dilakukan oleh Eselon I komoditas, sehingga implementasi program-program lingkungan Kementerian Pertanian dapat dibagi sebagai berikut.

Satu, Kegiatan utama dilaksanakan oleh Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan..., hewan, kesehatan hewan.

Kegiatan utama Ditjen Tanaman Pangan meliputi pengembangan padi jagung kedelai dan pangan lokal, perbanyakan benih sumber dan sertifikasi serta uji mutu benih, pengendalian organisme pengganggu tanaman OPT, penanganan dampak perubahan iklim dan penanganan kekeringan/banjir,

fasilitas alsintan, pengolahan dan pasca tanaman eh panen tanaman pangan.

Kegiatan utama lainnya yang dilakukan oleh Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Ditjen PHK sesuai dengan kewenangan sehingga ketersediaan pangan utama dari produksi dalam negeri benar-benar terjaga.

Kegiatan, dua, kegiatan pendukung untuk mendukung kegiatan utama Kementerian Pertanian yang akan dilakukan oleh Ditjen Badan Pangan lainnya di antaranya 1. Pengelolaan air, pengelolaan air irigasi seperti pembangunan konservasi air dan antisipasi anomali iklim, irigasi perpipaan dan perpompaan, rehab jaringan irigasi tersier, pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan Alsintan, penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani, pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian, pengelolaan produk terstandar dan dukungan manajemen serta pengawasan.

Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian mentargetkan produksi komoditas utama sebagai berikut. Produksi beras 32 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 350 ribu ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772 ribu ton, kakao 641,4 juta ribu ton, tebu 36,04 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi kerbau 399,41 ribu ton, daging ayam 4,34 juta ton.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Berdasarkan surat bersama Menteri PPN Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B.480/D.8/PP.04.03/07/2024 dan S-612/MK.02/2024 tahun 19... tanggal 19 Juli 2024, Hal: Pagu anggaran belanja Kementerian Lembaga dan Dana Alokasi khusus Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Kementerian Pertanian ditetapkan 7,91 triliun dengan rincian anggaran per program sebagai berikut:

1. Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas 2,73 triliun;
2. Program Nilai Tambahan Daya Saing Industri 1,61 triliun;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 658,64 miliar;
4. Program Dukungan Manajemen 2,9 triliun.

Sedangkan, rincian pagu anggaran dari masing-masing Eselon I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal 1,12 triliun;
2. Inspektorat Jenderal 58,24 miliar;
3. Irjen Tanaman Pangan 1,02 triliun;
4. Dirjen Hortikultura 902,99 miliar;
5. Dirjen Perkebunan 407,20 miliar;
6. Dirjen PKH 1,25 triliun;
7. Dirjen PSP 1,08 triliun;
8. Badan Standarisasi dan Instrumen Pertanian 1,129 triliun; dan
9. Badan PPSDMP 932,24 miliar.

Dengan memperhatikan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan sampai saat ini untuk Kementerian Pertanian masih sangat terbatas. Tentunya akan sulit untuk mendorong terjadinya peningkatan produksi pangan tahun

2025 secara signifikan. Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran 68 triliun yang akan digunakan untuk cetak sawah 1 juta hektar, optimalisasi lahan 600 ribu hektar, intensifikasi dan modernisasi pertanian, penyediaan susu gratis, pekarangan pangan bergizi dan lainnya. Untuk itu, kami mohon dukungan dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IV agar pagu anggaran di Kementerian Pertanian tahun 2025 nantinya dapat meningkat.

Pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Sebagai agenda selanjutnya, kami melaporkan bahwa pagu anggaran DAK sub bidang pertanian tahun 2025 sebesar 1,87 triliun yang terdiri dari DAK fisik sub bidang pertanian 1,6 triliun dan DAK non fisik ketahanan pangan dan pertanian 224,85 miliar. Kegiatan DAK fisik Kementerian Pertanian terdiri atas tiga menu di provinsi dan sembilan menu di kabupaten, masing-masing menu kegiatannya secara rinci seperti pada bahan yang telah disampaikan kepada Pimpinan, Anggota Komisi IV DPR RI. Sementara, untuk kegiatan DAK non-fisik terdiri dari tiga menu kegiatan yaitu 1. Operasional pengujian penyakit hewan, 2. Layanan operasional balai penyuluhan pertanian dan 3. Layanan operasional Puskeswan.

Sesuai surat Direktur Pangan dan..., dan Pertanian Bappenas Nomor T1394/DT.3.1.1 PP.04.12/07/2024 tanggal 19 Juli 2024, Hal: Sosialisasi DAK tematik kawasan produksi pangan nasional tahun anggaran 2025 bahwa telah ditetapkan sebanyak 17 lokasi prioritas provinsi dan 50 lokasi prioritas kabupaten yang akan mendapatkan DAK fisik pada tahun anggaran 2025.

Sesuai dengan Perpres Nomor 57/2024 dan PMK Nomor 25/2024 bahwa mekanisme pengusulan untuk DAK fisik dapat dilakukan oleh untuk regular pemerintah daerah langsung mengusulkan melalui Krisna DAK Bappenas dan dua afirmasi DPR RI diusulkan melalui Pimpinan Banggar DPR RI ke Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk diproses lebih lanjut melalui Krisna DAK Bappenas. Sementara, DAK non fisik sesuai PMK nomor 2000..., Nomor 204/PMK.7/2022 dilakukan melalui usulan kementerian lembaga Kementerian Keuangan c.q. DJPK Kemenkeu.

Pimpinan anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Sebagai agenda terakhir adalah terkait Program Penambahan Areal Tanam (PAT) padi sebagai antisipasi krisis pangan global. Situasi pangan global saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pangan bagi masyarakat saat ini semakin kompleks seperti adanya peringatan BMKG terkait kondisi kekeringan saat musim kemarau tahun 2024 serta diperparah lagi dengan situasi tekanan geopolitik yang saat ini semakin dinamis di Timur Tengah. Saat ini terdapat..., saat ini terdapat 58 negara dalam kondisi kelaparan kekurangan gizi 725 juta penduduk dunia menderita kekurangan gizi dan 7--16% penduduk Indonesia masih rentan kelaparan. Kondisi ini tentunya merupakan *warning* bagi ketahanan pangan nasional kita karena ketahanan pangan akan berdampak terhadap ketahanan negara.

Data BPS menunjukkan bahwa luas tanaman padi pada masa tanam Oktober sampai Juni 2024 sebesar 8,61 juta hektar dan mengalami penurunan 4,2 juta hektar atau 32,8% jika dibandingkan dengan rata-rata periode yang sama tahun 2015-2019 yaitu 12,82 juta hektar. Penurunan luas tanam ini tentunya sangat mempengaruhi luas panen padi yang berdampak pada penurunan produksi yang dihasilkan. Sebagai antisipasi terjadinya produksi beras berlanjut di tahun 2025, Kementerian Pertanian telah dan sedang melakukan peningkatan produksi melalui penambahan areal tanam melalui pompanisasi sawah, tadah hujan, optimalisasi rawa, tumpang sisip padi gogo pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Melalui ketiga kegiatan ini diharapkan produksi dapat bisa ditingkatkan agar tersedia pangan produksi dalam negeri yang membaik, membaik dan ketergantungan pada impor beras bisa ditekan.

Pak Ketua, Bapak Ketua, Bapak Pimpinan Anggota Dewan yang kami hormati,

Kami bisa tunjukkan satu tabel, satu tabel produksi kita. Izin Pak Ketua, produksi kita ini sesuai data BPS, Agustus, September, Oktober, ini positif dan yang bisa kita syukuri pada bulan September ini tertinggi dalam lima tahun bahkan 10 tahun produksi kita di saat musim kering. Ini hasil dari *refocusing* anggaran, kita fokus pada pompa, kemudian oplah dan benih unggul yang kita berikan secara gratis pada petani-petani yang ingin dulunya tanam satu kali menjadi dua kali. Balik tadi, ini tiga bulan yaitu Agustus, Agustus empat tahun tiga tahun tertinggi, September lima tahun bahkan pernah kami cek itu 10 tahun tertinggi. Ini anomali peningkatan produksi karena kita revisi anggaran pompanisasi. Oktober juga 2,5 tertinggi selama empat tahun. Nah kalau kita hitung luas produksi beras ini kurang lebih 1 juta. Artinya apa? Kita ada tambahan dibanding tahun sebelumnya itu kurang lebih 1 juta ton nilainya kurang lebih kalau nilai harga pasar katakanlah 10 ribu itu berarti 10 triliun tambahan hanya dari produksi beras daripada dari yang kita *refocusing* kemarin.

Juga kami sampaikan anggarannya 5,8 triliun itu hanya terealisasi 1,7 triliun, sementara proses. Kemudian juga yang terakhir adalah pupuk, kami sampaikan bahwa pupuk efektif, kami ulangi, pupuk efektif di bulan Juni. Mei bergerak Juni baru efektif diterima petani yang dulunya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Jadi efektif digunakan tambahan pupuk itu masuk Mei, Juni, Juli, Agustus sehingga ini juga berdampak pada produksi.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Demikianlah beberapa hal yang kami sampaikan dan pada kesempatan rapat kerja pada hari ini apabila masih diperlukan penjelasan lebih rinci, kami mohon perkenaan Pimpinan agar Pejabat Eselon I kami, Pimpinan, agar Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pejabat Eselon I yang terkait dapat diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan tambahan.

Atas perhatian Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, terima kasih Pak Menteri untuk semua penjelasannya. Memang tantangan yang luar biasa tentu karena tahun kemarin dan hari ini dengan anggaran yang sangat terbatas. Dengan anggaran yang memang seadanya, padahal tuntutan..., tuntutannya luar biasa, tuntutannya tidak hanya masalah cuaca tidak hanya masalah *climate change* tidak hanya masalah situasi alam tetapi juga memang kebutuhan dari masyarakat kita memang butuh perhatian yang *extraordinary*, cara kerjanya juga pasti tidak bisa seperti biasanya saja.

Baik, selanjutnya Bapak-Ibu dari para Anggota silakan untuk memberikan tanggapan atau respons apapun kepada Pak Menteri. Saya karena saya belum menerima catatan dari Bapak-Ibu siapa yang akan berbicara duluan, Pak Endro dulu habis itu Pak Firman.

Silakan Pak Endro, mohon maaf ini karena baru saya terima sekarang. Silakan Pak Endro, Pak Firman.

F-P. GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO):

Terima kasih Bu Ketua atas waktunya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua
Salam Indonesia Raya.

Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Menteri Pertanian dan seluruh jajaran,
Yang kami hormati Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia dan seluruh jajaran.

Izin pada kesempatan ini setelah mendengar paparan dari Bapak Menteri Pertanian, kami Fraksi Partai Gerindra Republik Indonesia menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan, dan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua dan juga tadi juga disampaikan oleh Bapak Menteri bahwa guna mewujudkan swasembada pangan di Indonesia dibutuhkan anggaran yang memadai dan melihat dana yang ada ini kami Fraksi Partai Gerindra meminta sepakat untuk meminta penambahan anggaran Kementerian Pertanian untuk tahun 2025.

Yang kedua salah satu visi Presiden terpilih adalah menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida secara langsung kepada petani. Pertanyaannya apakah kementerian sudah memiliki forma..., formulasi

penerapannya? Selanjutnya dengan program makan bergizi tentunya kebutuhan daging dan susu akan bertambah. Mohon Kementerian Pertanian dapat meningkatkan target produksi tidak hanya di tingkat 399,41 ton untuk daging sapi kerbau di tahun 2025 tetapi kami mohon untuk lebih tinggi lagi.

Selanjutnya tahun 2023 seperti terlaporkan dipaparkan oleh Bapak Menteri tadi, kementerian mendapat WDP Wajar Dengan Pengecualian, sehingga kementerian perlu berbenah sehingga di tahun-tahun berikutnya kembali kita mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP sehingga membanggakan kita yang bergerak di bidang pertanian.

Bapak Menteri beserta jajaran yang kami hormati,

Berdasarkan RDP tanggal 19 Juni 2024, Komisi IV DPR RI meminta kementerian untuk berbenah basis data nasional yang valid sebagai acuan penentu E-RDKK sebelum menerapkan sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang baru. Berkaitan dengan itu, bagaimana proses pembenihan data nasional yang ada supaya dalam melaksanakan pemantauan penyaluran pupuk bersubsidi yang baru nantinya akan lebih baik? Selain itu, bagaimana proses pembentukan panitia kerja pupuk bersubsidi guna mengawasi dan meminimalisir kelebihan penyaluran pupuk bersubsidi yang baru?

Selanjutnya juga berdasarkan RDP tanggal 20 Juni 2024 berkaitan dengan kelebihan penyaluran pupuk bersubsidi, Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia bersepakat untuk menunda penagihan sampai diperoleh solusi terbaik penyelesaian yang tidak memberatkan kios dan petani. Pertanyaannya, apa solusi yang paling tepat dan sudah dikoordinasi antara Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia yang tentunya tidak akan menimbulkan kerugian antara Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia serta kios dan petani?

Pada Raker tanggal 15 tahun 2023, Kementerian Pertanian menyampaikan target produksi komoditas utama tahun 2024 seperti jagung di tingkat 23,34 juta ton, daging sapi dan kerbau 405,44 ribu ton tetapi target komoditas tersebut menurun di tahun 2024, seperti jagung hanya di 16 juta ton dan daging sapi di 399 ribu ton dan beberapa komoditas yang lain juga turun. Mohon penjelasan dari Bapak Menteri Pertanian, kenapa target tersebut menurun dan saat ini target 2024 sudah mencapai beberapa komoditas utama tersebut?

Demikian masukan dan pertanyaan dari kami Fraksi Partai Gerindra. Dan, izin Ibu Ketua, tadi ada masukan yang dari daerah dari Aceh, akan dilanjutkan oleh Pak Khalid hanya sebentar, hanya sedikit untuk masukan dari Pak Khalid. *Monggo,* Pak Khalid.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Kok sampai dua?

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Bukan, tadi ada yang perlu saya sambung sedikit hasil kunjungan menteri kunjungan Wamen.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Bisa sebentar?

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Bisa.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Kita menghargai yang lain. Silakan Bang.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang kami muliakan,
Pak Pimpinan.

Pertama sekali, kami dari Aceh mengucapkan terima kasih atas kecepatan pompa kemarin tapi ini mohon maaf sekali lagi seandainya mungkin enggak datang Pak Wamen kemarin, *enggak* secepat itu. Buktinya banyak kelompok yang kami berikan dari anggota yang aspirasi belum jalan Pak. Ini mohon perhatian karena juga di samping pompa yang reguler itu ada pompa yang dari kami aspirasi Masyarakat juga menunggu, kita butuh.

Yang kedua, hasil pertemuan disuruh ingatkan tadi pagi lagi oleh masyarakat Aceh khususnya penyuluh Pak. Mohon perhatian agar penyuluh itu bisa ditarik ke pusat Pak tidak tumpang tindih. Ini harapan kita dari Aceh tadi pagi mereka telepon meminta itu lagi. Tahu mereka ada raker hari ini, maka izin saya menyampaikan itu.

Terima kasih sekali lagi.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik terima kasih. Pak Firman saya boleh minta izin Pak Slamet mau duluan, oh *oke* baik. Silakan Pak Firman.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO):

Terima kasih Bu Pimpinan.

Saya mau tanya dulu Bu, ini pandangan terhadap anggota atau Fraksi?

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Fraksi.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO):

Kalau Fraksi, saya tanyakan dulu. Pak Hanan, ada yang mewakili Fraksi?

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Belum ada perintah berarti, Pak Firman.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO):

Belum ada perintah ya.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Kan di tangan Pak Firman berarti kan?

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO):

Bukan.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan Pak Firman.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO):

Saya sudah lengser Bu, *lengser keprabon* Bu. Sudah *dilengserkan* Bu.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ada lengser. Ini benar-benar masa transisi, jadi memang harus hati-hati siapapun.

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO):

Baik, terima kasih. Tapi selamat Bu, PKB sudah selamat.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan yang kami hormati,
Pak Menteri Pak Wamen beserta jajaran yang saya hormati, dan
Anggota Komisi IV yang saya banggakan.

Pertama, kami memberikan apresiasi terhadap yang telah disampaikan Pak Menteri tadi. Tentunya dalam perencanaan, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah karena pemerintah nanti akan yang mengeksekusi dan sebagai pelaksana. Namun tentunya, kami dari Fraksi Partai Golkar dan mungkin nanti dalam pendalamannya teman-teman juga bisa menambahkan ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya ini akan menjadi masukan kepada pemerintah. Tadi Pak Menteri sudah menyebutkan banyak berikan program-program, kami sampaikan terima kasih atas nama rakyat. Namun tentunya program-program yang diberikan ini Pak, ternyata tidak sesuai dengan harapan rakyat.

Pertama masalah benih. Benih itu banyak keluh kesah daripada masyarakat bahwa benih yang dibagikan pemerintah itu hampir rata-rata tidak menimbulkan efek yang produktif karena kualitasnya sangat rendah dan bahkan masyarakat itu banyak yang mengeluh bahwa, “Pak, lain kali enggak usah diberikan program seperti ini.” Karena benih atau varietas itu Pak, juga tergantung daripada wilayah dan lokasinya masing-masing. Seperti zaman dulu pernah kami juga dapat hibrida dan waktu itu kami ingat pada waktu saya dari Penang kita ke Cina, itu juga Cina mengatakan kenapa heran Indonesia kok menanam hibrida. Padahal di Cina sendiri itu hibrida masih dalam posisi untuk dikaji terus-menerus tapi kita kan terus berlanjut sampai batas waktu tidak ditentukan ketika itu.

Oleh karena itu Pak, masalah benih, saya masih ingat ketika Pak Menteri menjabat di periode sebelumnya Bapak sangat mendukung terhadap benih-benih yang diproduksi masyarakat. Saya rasa ini juga harus diberikan tempat. Jangan sampai benih-benih hasil kreativitas masyarakat ini dimatikan sehingga petani-petani itu tidak ada semangat karena setiap mereka melakukan kreativitas untuk membuat benih-benih lokal yang sesuai dengan kondisi lahan di masing-masing wilayah itu, akibat kebijakan mereka tidak bisa melakukan. Padahal justru itu malah lebih bagus sebetulnya. Di jaman dulu era orde lama itu banyak itu benih-benih warga lokal yang dimanfaatkan dan itu berhasil.

Dan kedua Pak, masalah benih ini juga ketika terjadi puso yaitu gagal panen akibat bencana. Distribusi pemberian bantuan benih itu birokrasinya panjang Pak. Kalau bisa ini di-*cut-off* Pak karena ini namanya bencana karena mereka biasanya kan setelah bencana itu kan satu bulan kemudian dia harus menanam kembali tapi prosesnya itu berkepanjangan Pak. Di daerah itu banyak sekali yang mengeluh bahwa bencananya sudah selesai kapan-kapan, benihnya belum turun. Ini mohon juga menjadi perhatian.

Kedua mengenai pupuk Pak. Pupuk juga sama pupuk kreativitas masyarakat ini sangat luar biasa. Kami memberikan apresiasi kepada

pemerintah Program UPO yang sudah berkembang tetapi kembali lagi bahwa pupuk-pupuk yang diinisiasi oleh masyarakat dan sekarang masyarakat kita ini Pak cerdas-cerdas, anak-anak muda terutama. Kalau Bapak nanti suatu saat memberikan waktu kepada saya, saya bisa tunjukkan anak-anak muda milenial yang bisa memproduksi pupuk organik yang begitu luar biasa dan didemplot hasilnya jauh lebih bagus daripada pupuk-pupuk organik yang sudah beredar. Namun masalahnya Pak, pemerintah itu tidak hadir di situ, negara tidak hadir untuk rakyat kita, tidak seperti di Cina. Kalau Cina itu setiap ada kreativitas masyarakat didukung dengan regulasi. Untuk pupuk ini Pak, uji efektivitas saja di kampus, Pak Menteri mungkin tahu atau mungkin tidak tahu atau mungkin tahu pura-pura enggak tahu, mahal Pak sampai 50 juta di Gajah Mada Pak. Kemudian untuk uji lab, itu 15 juta Pak, itu 15 juta. Ini luar biasa Pak.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Ya yang tadi yang 50 juta apa itu Pak?

F-P. GOLKAR (FIRMAN SOEBAGYO):

Uji efektivitas itu kan dilakukan di kampus Pak. Itu pupuk-pupuk yang diproduksi masyarakat itu dilakukan setelah uji lab kemudian diminta uji efektivitas di kampus itu 50 juta Pak. Nah mohon seperti ini Pak pemerintah bisa membuat standarisasi ketika masyarakat atau kreativitas masyarakat yang ingin memproduksi pupuk-pupuk dalam rangka untuk mengatasi kebutuhan diberikan kemudahan. Kalau subsidi, saya enggak setuju karena kalau subsidi itu akan menjadi beban negara dan semuanya minta, disuruh bayar tetapi murah dan prosesnya dipercepat. Jangan sampai alasan gara-gara akan menaikkan biaya, kemudian prosesnya menjadi lama. Ini juga mohon menjadi perhatian daripada Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri.

Terima kasih Pak Wamen, kemarin Pak Wamen telah mengunjungi kampung saya di Pati dan saya lihat meninjau pompa. Sayangnya Pak, pompa ini memang dulu konsepnya bagus tetapi mungkin sekarang ini Pak sudah tidak efektif lagi karena pompa itu pompa peninggalan zaman order baru. Dari skala ekonomisnya mungkin tidak mungkin kalau itu mau diperbaiki seperti apapun itu mungkin tidak bisa akan bisa berjalan dengan baik karena sumber mata airnya sudah enggak ada Pak dan biayanya juga cukup mahal. Kalau itu menggunakan bahan bakar solar itu mungkin juga tidak mungkin bisa mengatasi kebutuhan karena solarnya juga mahal dan petani cari solar pun juga susah prosedurnya terlampau panjang. Oleh karena itu, mungkin kalau mau dihidupkan Pak itu harus ada PLN masuk diganti dengan sistem PLN Pak, itu akan bisa lebih efektif. Ini masukan saja.

Dan pompanisasi Pak, ini juga mohon dapat ditinjau kembali. Saya lihat pemetaannya masih lemah Pak. Jadi program-program pompanisasi kami turun di lapangan seperti video yang kami *share* ke para teman-teman di kementerian itu banyak Pak irigasi-irigasi yang primer sekunder itu semua kering Pak. Dan, Bengawan Solo kami telusuri Pak dari mulai Blora sampai terus-menerus terus sampai kemarin ke daerah perbatasan Rembang itu Pak

ternyata juga tidak seperti Bengawan Solo zaman dulu Pak. Airnya juga sudah menyusut cukup drastis sehingga ini persoalan-persoalan serius dan saya mohon Pak ini mungkin menjadi perhatian kalau bisa Pak digeser dirubah menjadi pompa sumur dalam Pak. Itu lebih efektif walaupun manfaatnya itu tidak semaksimal itu mungkin bisa dapat 20 sampai 15 hektar, itu mungkin bisa lebih efektif lebih banyak sumur dalam karena biaya untuk beli air ini mahal Pak.

Di beberapa tempat, saya survei itu untuk biaya tanam jagung Pak 1 hektar itu untuk beli air mulai dari masa tanam sampai mereka itu menghasilkan panen itu per hektarnya habis 1,5 juta per hektar. Kalau tembakau di daerah tertentu itu hanya 100 eh 1 juta, satu tangki 125.000 kalau di daerah lain ada yang 150.000 per tangki dan satu hektar itu mencapai seratus lima. Kalau untuk tanaman tembakau Pak, itu masih bisa untung karena tembakaunya harganya mahal tapi kalau jagung petaninya bukan untung Pak tapi “buntung”. Ini persoalan mohon kalau bisa pompanisasi dalam rangka untuk menuju swasembada pangan dalam mengatasi musim kemarau panjang ini terobosan pemerintah sebetulnya bagus mungkin salah menerapkan apa yang harus diberikan kepada masyarakat karena pemetaannya ini masih kurang akurat.

Ini yang kami sampaikan kepada Pak Menteri jadi sumur dalam, jalan usaha tani itu juga mohon Pak itu juga menjadi hal yang penting bagi masyarakat dan paling akhir adalah karena jalan usaha tani dinikmati semua pihak daripada mesin yang besar-besar.

Terakhir Pak, pemberian program bantuan seperti *combine* dan kemudian traktor roda empat. Regulasinya pemerintah mungkin perlu pengetatan Pak karena banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang diberikan itu hanya dipakai untuk dirinya sendiri. Bahkan, banyak juga yang mereka mendapatkan *combine* itu disewakan ke daerah-daerah lain bukan untuk kepentingan daerah itu. Ini saya survei dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah kemudian bahkan ada program yang diberikan di Jawa Timur larinya ke Jawa Tengah. Program di Jawa Barat masuk ke Jawa Tengah. Program di Jawa Tengah masuknya ke Jawa Barat. Ini mungkin perlu ditinjau kembali agar semua program-program yang diberikan pemerintah ini bisa tepat sasaran dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Bahkan, saya Pak menyampaikan dan laporan kami menarik program yang saya berikan kepada petani dalam bentuk *combine*. Saya tarik karena pada waktu saya itu memberikan program yang tujuannya untuk masyarakat dan untuk kabupaten itu disewakan di tempat lain. Kami punya tim dan langsung saya koordinasi dengan dinas, izin saya tarik dan nanti saya berikan kepada masyarakat yang betul-betul bisa memanfaatkan untuk daerah kabupaten yang kita berikan karena tujuan program ini adalah untuk wilayah itu bukan untuk wilayah lain.

Jadi ini mungkin menjadi perhatian Pak Menteri dan Pak Wamen juga jajaran Eselon I mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan ke depan. Pada dasarnya kami Fraksi Golkar setuju dengan apa yang Bapak sampaikan perencanaan tapi perlu evaluasi menyeluruh terhadap program-program yang

Bapak berikan. Mudah-mudahan ini membawa keberhasilan dan *Insyallah* mudah-mudahan untuk periode berikutnya Bapak akan melanjutkan kembali dan kita tinggal mereview kembali tentang rencana kerja kita ini.

Demikian terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Terima kasih Pak Firman.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih meskipun kepanjangan. Silakan Pak Slamet.

F-PKS (drh. SLAMET):

Senior curhat.

Baik, *Bismillahirrahmanirrahim.*
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Pertama menyampaikan tahniah selamat untuk Pak Wamen dan juga pejabat-pejabat baru. Doa saya mudah-mudahan selalu dalam bimbingan sehingga tanda tangannya yang masih laku mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk rakyat. Jadi dengan pejabat jabatan baru ini amanah dari Allah mudah-mudahan semakin bisa membuat petani kita senyum, ketahanan pangan kita bisa menuju kepada kedaulatan pangan bukan sekedar ketahanan pangan. Amin I*nsyallah*.

Pertama, saya menyampaikan *innailaihi wa innailaihi rojiun* juga ini Pak. Jadi kalau kemarin saya menyimak pidato tanggal 16 Agustus dari Presiden kita hari ini, itu anggaran ketahanan pangan itu 124 triliun. Sementara pagu yang disiapkan untuk pemerintah yang baru untuk Kementan cuma 7 triliun. Tujuh koma sekian tadi Pak ya? Iya sehingga hitung-hitungan saya kalau dari sisi bicara pangan hanya 5% 5,6 anggaplah 6% begitu sehingga ini titip kepada pemegang saham, Pak Budi ini nah ini. Ini harus menjadi perhatian kita semuanya ya. Sehingga, saya pikir di akhir pemerintahan baik Komisi IV maupun nanti Kementan kita perlu sinergis merumuskan yang disampaikan Presiden 124 triliun itu untuk ketahanan pangan arahnya ke mana? Kalau hanya 6% diberikan kepada Kementan dan saya lihat di sini di situ tidak ada sedikit pun satu poin yang disampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani enggak ada. Silakan dibuka lagi pidato Presiden tanggal 16 Agustus. Nah ya khawatir saya juga begitu Pak nah ini sehingga ini menjadi perhatian bagi kita.

Saya melihat Presiden yang baru ini punya semangat yang luar biasa untuk ketahanan. Beliau mantan ketua HKTI, masa kemudian mau meninggalkan pertanian. Nah ini memang masih bagus tetapi kan sangat tidak..., sangat jauh begitu ya dari 124 hanya dianggarkan 7, walaupun nanti tersebar. Oleh karena itu, ya saya pikir perlu fokus. Kalau mau meningkatkan produktivitas berapa sih yang kemudian harus diajukan? Jangan sampai memang secara anggaran besar 124 triliun tapi tersebar di mana-mana. Irigasi primer kita rusak, irigasi sekunder kita juga rusak, program jaringan irigasi yang diberikan Kementan tiga tahun ke belakang itu juga tidak meng-*cover* yang rusak. Nah ini sehingga perlu diberikan rangkuman program apa yang utama untuk kemudian meningkatkan produktivitas kita. Termasuk, saya masih mempunyai pandangan bahwa produktivitas petani itu tidak akan naik kecuali ada jaminan kesejahteraan dari para petani kita. Artinya ini akan masuk kepada bagaimana nanti perlakuan kita kepada para petani kita termasuk produksi pasca panennya.

Nah ini mohon kemudian Pak Menteri memberikan *resume,* termasuk kita, Komisi IV memberikan satu catatan kita titipkan kepada Menteri yang baru nanti begitu ya kalaupun toh lama jadi baru kepada pemerintahan baru kita berharap betul-betul kemandirian pangan kita akan kita bisa dapatkan di pemerintahan yang baru. Ini ini catatan saya sehingga mohon apa kita baik nanti Kementerian Pertanian maupun Komisi IV memberikan catatan terhadap arah 124 triliun yang disampaikan oleh Presiden di pidato 16 Agustus itu fokus.

Kemudian itu juga kaitannya nanti saya dengar subsidi pupuk itu mengarah kepada pemberian secara tunai. Ini yang digagas oleh Kemenko. Kalau kita bicara tentang profesi petani ini tidak akan menguntungkan untuk pertanian kita ke depan Pak. Kenapa? Kalau nanti subsidi pupuk itu kemudian di situ, saya cenderung masih berprinsip bagaimana subsidi ini diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan petani dalam hal misalnya subsidi pasca panen. Ini akan lebih menguntungkan. Paling tidak memberikan rangsangan kepada petani kita bahwa kalau bertani sejahtera sehingga para generasi muda harapannya masih mau menjadi petani. Kalau dalam bentuk *cash* bentuk subsidi petani yang tidak bisa meningkatkan kesejahteraan kalau produktivitas bisa jadi meningkatkan tapi kesejahteraannya tidak berbanding lurus. Ya sehingga ini kita berikan catatan mumpung-mumpung sebelum ini di eksekusi gitu ya. Kalau betul itu yang terjadi maka tidak akan memberikan harapan kepada petani kita. Ya kalau memang betul subsidi silang eh mohon maaf subsidi pupuk ini sifatnya tunai ya ini.

Kemudian saya tadi memperhatikan ada satu yang disampaikan oleh Pak Menteri ada program lagi cetak sawah 1 juta hektar 68 triliun. Mohon dikoreksi kalau pendapat saya salah. Kalau tidak salah ini pernah menjadi temuan BPK. Mohon dikoreksi kalau salah. Program ini tidak menjadi program yang baru, sehingga saya mengusulkan sebelum disetujui oleh Komisi IV, kita minta data *real*nya di titik koordinatnya kemudian luasannya itu ada di mana sehingga kita jelas kalau kita mau menyetujui cetakan lawas eh cetakan sawah cetakan lahan baru memang yang dulu juga berhasil itu. Ini cukup besar Pak, 68 triliun. Ada tadi disampaikan oleh Pak anu itu kebetulan saya simak. Nah ini sehingga kita dalam hal hak *budgeting* kita akan minta data itu dulu

keberhasilan yang sebelumnya, baru kemudian kita akan bicara apakah kemudian disetujui atau tidak.

Dan yang terakhir, program makan siang bergizi gratis. Ini kan sebenarnya kalau kita lihat ini luar biasa. Potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita itu luar biasa akan ada jaminan untuk kemudian dibeli begitu cuma di lapangan kemarin saya sudah ya kontak beberapa Pak. Ini ternyata dalam proses nanti itu akan tidak menghidupkan UMKM kita karena berbagai persyaratan yang ini sulit dipenuhi oleh UMKM kita. Ya misalnya dengan pengadaan daging ayam itu syaratnya tidak mungkin dipenuhi oleh pemotong-pemotong atau peternak mandiri kita. Saya khawatir ini, saya nitip kepada Pak Budi lagi nih berharap banyak kepada beliau sebagai Pimpinan Komisi IV sebagai pemegang saham juga nanti bahwa program ini harapannya bisa meningkatkan UMKM kita dan petani kita. Ya ini program bagus, kalau kemudian saya pernah kemudian apa menye... masuk ke situ persyaratannya itu....(diinterupsi)

WAKIL KETUA KOMISI IV (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Slamet, *sorry* maaf saya potong. Ini saya rasa kita terima masukan Pak Slamet tapi sudah di luar..., ini di Komisi IV. Kita terima itu, saya rasa untuk program dan lain sebagainya pemerintah selanjutnya ada forumnya juga Pak Slamet, tapi kita terima masukan Pak Slamet. Supaya tidak berapa panjang, tadi kan intinya kita mengerti yang bagian pertama mengenai makan siang dan lain sebagainya kami akan tampung terus semua masukan ya tapi saya rasa forum hari ini kita bicara APBN 2025, kita coba. Tadi Pak Slamet bilang kita fokus dengan tupoksi Kementan.

Terima kasih Pak Slamet.

F-PKS (drh. SLAMET):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya hanya mengingatkan ini maksud, mohon maaf sekali Pak Ketua. Maksud saya gini ini potensi kepada kesejahteraan petani ini luar biasa program ini, hanya di lapangan jangan sampai mempersulit itu persyaratan-persyaratannya Pak. Tolong nanti Kementerian Pertanian komunikasi dengan pihak-pihak terkait agar ini yang memanfaatkan betul-betul petani bukan konglomerasi. Saya bicara tentang nanti *supply* petani kita misalnya, peternak kita *supply* daging ya itu yang saya lihat persyaratannya yang bisa memenuhi adalah integrator Pak bukan UMKM petani kita. Nah saya mohon Kementerian Pertanian bisa memberikan peran bahwa program ini kalau berjalan memberikan efek positif terhadap kesejahteraan para petani kita. Saya tidak menyinggung dengan yang lain bahwa ini program bagus ada potensi mensejahterakan petani kita, tetapi kalau ini tidak dikawal nanti ujung-ujungnya yang untung adalah konglomerasi itu saja.

Mohon maaf Pak Budi barangkali ada yang kurang berkenan dan terima kasih untuk semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wassalamualaikum.

Baik, terima kasih Pak Slamet. Pak Kanjeng Darori, silakan.

F-P. GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M., IPU.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat pagi Ibu.

Piro? Satu setengah lah. Jadi terima kasih.

Pertama kepada Pak Daryono juga teman-teman Eselon I yang baru dilantik, kami mengucapkan selamat, semoga amanah, sukses dan lancar amin.

Yang kedua kemarin saya mendengarkan ekspos dari Wakil Menteri Keuangan bahwa Kementan itu termasuk 10 program prioritas kabinet ataupun periode 2025 yang akan datang. Tadi disampaikan anggarannya sangat kecil Pak Menteri, 7,9 kalau tidak salah. Saya sarankan ini karena masuk prioritas, mestinya minimal seperti waktu Pak Menteri pertama jadi tahun 2014 kalau tidak salah 30 triliun ya 32 atau berapa lah itu berapa lah itu tapi saya minta tolong ada rinciannya Pak apa untuk apa itu minta uang? Jangannya minta gelondongan sehingga nanti bisa disampaikan untuk bisa direalisasi mudah-mudahan *Insyaallah* gitu.

Terus yang kedua, saya dapat pertanyaan ini Pak Menteri mungkin pada Badan Pangan, kondisi beras kita sekarang seperti apa? Apa surplus atau minus atau gimana? Ya ini mohon ada penjelasan karena ini di luar didengar, daripada saya yang menjelaskan saya kira Bapak-Bapak lebih tepat gitu.

Yang ketiga, Pak Menteri mau cari lahan. Di Jawa Pak Presiden KLHK sudah menyetujui 1,1 juta hektar untuk perhutanan sosial. Nah perhutanan sosial artinya selain fungsi hutan untuk pangan tapi sampai sekarang dalam perasaan ini salah digunakan karena keinginan dari teman-teman Komisi IV agar memberdayakan yang 6 ribu desa di sekitar kawasan itu ternyata ini banyak orang luar yang masuk ke lokasi tersebut. Ini sangat potensial untuk pengembangan pangan di Jawa dan juga saran saya sesuai dengan arahan Presiden di Jawa itu ada tanaman buah yang luasnya cukup memadai seperti di Thailand ya kan rambutan 50 hektar itu ada tanahnya. Saya kira ini perlu ke depannya ya diprogramkan untuk kegiatan itu.

Yang kedua Tora Pak Menteri. Presiden bagi sertifikat hampir 6 juta hektar kepada rakyat tapi tidak ditangkap oleh kementerian lain. Sertifikat ini sekarang diperjualbelikan. Nah mestinya jangankan untuk menanam sawit Pak, untuk makan saja susah. Mestinya ada koordinasi antar lintas kementerian

mungkin dengan perbankan ada kredit untuk bisa menanam tanaman-tanaman pertanian misalkan sawit atau karet dan seterusnya. Ini ada enam juta Pak sudah keluar sertifikatnya.

Yang terakhir, ini singkat saja ini Pak Menteri, PR di Undang-Undang Cita Kerja sudah diberikan bahwa rakyat boleh menggarap tanah di kawasan hutan lima hektar tapi kenyataannya sampai sekarang belum tindaklanjuti seperti yang ada. Bahkan, pada saat saya masih di sana dulu kita mendapatkan di Riau 300 ribu hektar tapi kemarin pas ke Riau malah kata Gubernur di sana ada satu juta hektar lahan sawit tanpa prosedur milik rakyat. Ini tolong jangan sampai nanti timbul masalah baru, ini PR kerja sama ya mungkin kalau Pak Menteri itu adalah pembinaan teknis mungkin luasan kawasannya ada di kehutanan dan seterusnya gitu.

Sekian terima kasih, Ketua.

F-PDIP (KETUA RAPAT/ SUDIN S.E.):

Seharusnya tadi ngomong ada yang itu itu yang tadi itu, Pak Firman ya karena Cipta Kerjanya kan dia yang buat itu ya.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, terima kasih. Silakan Pak Hermanto. Ini ada, ada dong kalau Pak Hermanto masa enggak ada.

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Berapa menit apa satu menit.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ketua,
Pimpinan Komisi IV,
Pak Menteri bersama Pak Wamen bersama jajaran semuanya.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama saya ingin menyampaikan kalau saya melihat kecenderungan pengelolaan program Kelompok Wanita Tani atau kaitannya dengan P2L. Saya melihat perkembangannya cukup bagus ya di beberapa tempat itu cukup sukses, namun di kelompok ini itu sedikit mengalami kesulitan terkait dengan bibit dan benih. Saya pikir ini kementerian perlu mempersiapkannya untuk mendukung untuk pemberdayaan supaya KWT ini pun juga sebagai tulang punggung untuk ketersediaan pangan. Karena, saya melihat bahwa kelompok ini sangat produktif efektif untuk melakukan tanam untuk keperluan-keperluan sayur-mayur Pak. Jadi saya minta ini supaya didukung dengan benih dan bibit. Itu yang pertama.

Yang kedua terkait dengan soal pompanisasi saya di Dapil itu ada namanya disebut dengan Nagari Tsunami. Ini adalah ada di situ pompa besar yang dibangun pada tahun 70-an dan dia bisa menghidupkan ratusan hektar. Nah belakangan pompa itu macet, tidak berfungsi sudah kurang lebih lima tahun. Ya silakan.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Tempatnya, tempatnya detailnya.

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Di Sumani Kabupaten Solok. Pompa itu adalah merek mesinnya itu adalah dibuat dari Swiss, Swiss jadi memang pompa besar dia. Berapa waktu yang lalu kita sudah membantu pompa besar di sana. Bantuan pompa besar itu hanya bisa memenuhi 20% kebutuhan air, jadi masih ada 75% lagi kebutuhan air di sana. Bila nanti ini kementerian membantunya ini, Insyaallah itu luasan karena memang itu adalah pusat pertanian di Kabupaten Solok. Saya minta ini tolong dibantu Pak Menteri ya mohon ini dibantu.

Kemudian yang kedua terkait dengan soal DAK. Eh yang ketiga nih DAK, DAK ini kan melalui Krisna. Sejauh yang saya ketahui Krisna ini kan agak rumit, agak rumit karena dia harus berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian Keuangan dan segala macamnya. Nah tentunya kami pun juga sulit mengontrol DAK ini. Di mana alokasinya, kapan diturunkan, sehingga kita itu sulit melakukan pengawasan. Nah saya minta supaya ada agenda-agenda DAK ini, ini kami mendapat informasi itu di mana alokasinya kapan adanya dan apabila itu adalah diaspirasikan nah ini mohon juga kementerian ini memberikan kemudahan terhadap anggota untuk mendapatkan atau melakukan alokasi yang tepat begitu karena di sini problemnya banyak sekali saya melihat karena saya sudah juga coba sulit sekali.

Kemudian yang keempat ini terkait dengan soal makan gratis, tadi sudah disinggung juga. Saya ingin mengingatkan saja ini *leading* sektornya di mana begitu ya kan. Apakah di Kementerian Pertanian ataukah di kementerian mana? Kita juga enggak tahu, sementara makan gratis ini sangat erat kaitannya dengan soal pangan ya kan dan apalagi di sini Pak Menteri menyebutkan ada susu ya kan. Apakah susu ini adalah bagian dari makan gratis ataukah ada dukungan-dukungan produk lain untuk mendukung itu? Nah, saya mendukung sebenarnya tambahan anggaran sebesar 68 triliun itu ya. Nah tentunya kita bertanya, saya sendiri bertanya ini 68 triliun ini apakah untuk kebutuhan pangan gratis itu dan lalu siapa yang mengelolanya kementerian yang mana? Tapi, kalau saya mengkalkulasi Pak Menteri ya bila pangan makan gratis itu nilainya katakan 7.500 ya kan kemudian jumlah yang akan kita beri makan itu adalah katakan 25 juta jiwa ya kemudian kita kali satu tahun itu kita membutuhkan dana sekitar 68,9 triliun. Itu dana yang dibutuhkan untuk hanya senilai 7.500 per orang per kepala, begitu. Nah tentunya apakah 68 yang disediakan sebagai anggaran tambahan ini apakah mencukup itu? Kalau mencukup itu, maka saya yakin nanti program kementerian program pokok-pokok kementeriannya itu akan semakin kurang efektif. Nah menurut

saya ini perlu ada klari apa *clear* lah kita di sini dengan kementerian mana yang berkaitan dengan soal makan gratis ini.

Demikian saja Bapak Menteri, terakhir saya ingin menyampaikan....

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Alhamdulillah, oh masih terakhir ya? Kirain demikian? Oke, baiklah.

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Antara ini terakhir saya juga terakhir ibu ya, setelah itu kita berpisah.

Jadi terkait dengan ini adanya tadi kita bicara pupuk, air dan benih ini adalah kebutuhan pokok petani. Saya pikir kalau kebutuhan tadi air saya sangat mendukung program Pak Menteri terkait dengan pompanisasi. Saya mohon perhatian supaya pompanisasi ini tidak gagal, pastikan bahwa sumber airnya ada ya terutama nanti saya usulan saya yang dapil tadi saya itu tolong juga itu dipompanisasikan.

Demikian Pak Menteri dan Pak Wamen. Semoga Pak Wamen bisa ke Sumatera Barat untuk melihat seperti apa sebenarnya lahan pertanian itu. Demikian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Teman-teman Anggota Komisi IV, kita tidak bicara makan gratis di sini. Jadi itu tupoksinya menteri adalah menyiapkan bahan-bahan pangannya, bukan kita bicara makan gratisnya supaya jelas jangan melebar ke sana-ke sini.

Ya lanjutkan, Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Silakan Pak Hanan.

F-P. GOLKAR (Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri beserta Wamen dan jajaran Eselon I, Kepala Badan Pangan dari BUMN lingkup mitra Komisi IV yang saya hormati.

Pertama, kami ingin mengomentari atau mengingatkan terkait dengan laporan keuangan Pak di 2023. Kalau kita lihat dari 2016 sampai 2022 itu WTP Pak ya. Prestasi di Kementerian Pertanian yang sangat luar biasa dia mempertahankan tujuh kali WTP. Kemudian di 2023, Wajar Dengan

Pengecualian, artinya apa ada penurunan kinerja pengelolaan keuangan pada tahun 2023. Pak Menteri, saya kira sampai berakhir nanti kabinet ini tujuh bulan Pak ya, tujuh bulan akan mengelola ini. Saya kira dengan kemampuan kepiawaian Pak Menteri, harapan saya pada saatnya nanti di 2025 kita mendengarkan atau mendapat laporan keuangan dari Kementerian Pertanian sudah bisa dikembalikan ke WTP lagi Pak. WDP artinya apa, bahwa ada masalah ya di dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Keuangan selama tahun 2023. Kita perlu kaji apa-apa saja yang bermasalah itu, kemudian di 2024 ini tentunya kita harapkan nanti pada saat penilaian di 2025 kita mendapat WTP lagi Pak. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua untuk rencana kerja Kementerian Pertanian 2025, ini saya pikir perlu benar-benar dicermati Pak bila perlu di-redesain kembali karena apa kita mempersiapkan untuk rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025--2030 mungkin Pak seperti itu. Oleh karena itu, kita lihat lagi dan saya sangat bersyukur ada kata-kata RSPP Pak. Tadinya kami lihat RSPP ini apa Rumah Sakit Pusat Pertamina, ternyata Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran di Kementerian Pertanian. Nah kalau redesain, Pak ini coba benar-benar dicermati kita meletakkan fondasi untuk lima tahun ke depan. Target-targetnya adalah saya sudah dengar beberapa kali bagaimana kita tidak ada lagi impor beras, swasembada beras, swasembada jagung dan sebagainya. Nah, ini saya kira kalau yang namanya redesain, redesain benar-benar Pak. Kalau melihat yang disajikan ini di halaman 12 ya masih rata-rata air saja Pak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya saya kira perlu dicermati benar ya disiapkan dengan sebaik-baiknya.

Nah, kemudian terkait dengan target-target bukan hanya 2025, saya kira sampai 2030 nanti ini apa-apa yang harus kita lakukan khususnya padi Pak yang kita sebenarnya malu Pak negara agraris kemudian kita mengimpor berjuta-juta ton beras dua tahun terakhir ini. Nah untuk itu ini perlu saya sepakat redesain tadi Pak. Redesainnya seperti apa? Kita harus memastikan padi itu ditanam di mana Pak? Selama ini kita menerima sekian hektar sekian hektar sekian hektar, terima produksi. Nah ini kita harus pastikan bila perlu sampai tingkat desa Pak. Kalau ada laporan ada luas tanam atau luas sawah fungsi sekian benar-benar dicek Pak, benar enggak angka-angka itu. Nah kemudian baru kita lihat terkait dengan produktivitas misalnya. Sampai hari ini yang namanya Pak, diproduksi oleh petani Pak, bukan oleh perusahaan. Kita juga heran juga kenapa tidak ada perusahaan yang mau masuk ke sektor ini. Tadi kita sudah mendapat laporan ada yang dijelaskan oleh kawan-kawan ada rencana satu juta hektar sawah ada enggak investor yang mau masuk di situ Pak, swasta yang mau tanam padi. Sampai hari ini tidak ada swasta yang mau tanam padi. Artinya Pak, ini enggak menarik Pak. Ekonomi perberasan ini tidak menarik sehingga mereka enggak masuk ke wilayah itu.

Nah coba Pak, ini kita apakan ini? Yang namanya petani sawah ya antara kalau di Jawa ini paling tinggi setengah hektar gitu kan. Kalau di luar mungkin ada yang dua hektare. Nah bagaimana kita menggerakkan orang yang sekian juta menanam padi ini supaya apa yang direncanakan itu bisa tercapai. Nah sehingga Pak saya menyarankan Pak pola-pola gerakan yang sudah dilaksanakan sebelumnya tahun 1984 kita swasembada beras ya

mungkin pola-pola gerakan itu kita enggak usah malu-malu Pak, kita terapin lagi karena manusianya banyak sekali petaninya banyak sekali yang menanam padi ini. Ini harus ada gerakan.

Dulu tidak ada keluhan Pak. Pupuk subsidi tidak ada keluhan waktu kita swasembada itu melalui pola-pola Bimas. Saya sudah yang kedua mungkin ngomong. Atau kita kembalikan lagi sistem pola Bimas ini ke depannya supaya apa yang kita harapkan ini bisa tercapai. Kemarin saya dengar itu Pak Prabowo sampaikan ya Pak Presiden terpilih kita tidak boleh lagi impor beras. Wah itu tantangan yang sangat luar biasa ya. Kapan kita tidak impornya?

Nah terkait dengan padi ini Pak, kalau pupuk subsidi penyalurannya Pak yang perlu ya dilihat lagi ya ditinjau lagi. Pola-pola saya kembali lagi pola-pola Bimas itu apa tidak perlu kita terapkan sehingga tidak ada permasalahan terkait penyaluran pupuk subsidi. Begitu juga benih Pak, sekarang ini sudah cukup maju tadi saya dengar benih padi hibrida sudah begitu disukai digandrungi oleh petani.

Nah ke depan Pak harapan saya yang namanya hibrida ini kalaupun kita ada BUMN misalnya dulu saya tidak tahu PT Pertani masih ada apa tidak PT Sang Hyang Sri apa tidak masih ada apa tidak, sudah fokus saja yang hibrida Pak ya, swasta juga perusahaan swasta hibrida. Nah sedangkan yang non-hibrida saya sarankan bagaimana kemudian kita menghidupkan kembali penangkar-penangkar benih yang sudah berpuluh-puluh tahun bisa membantu kita, nah sehingga keluhan-keluhan terhadap varietas itu bisa kita minimal, minimalisasi Pak. Misalnya orang di Lampung misalnya sukanya jenis Ciherang misalnya, ya kenapa di Lampung penangkaran Ciherang ditingkatkan didekatkan si penangkar ini ke si petaninya. Sedangkan yang non-hibrida, sedangkan BUMN seperti dulu kalau ada Sang Hyang Sri dan sebagainya bisa kita libatkan juga jadi ke depannya yang namanya hibrida supaya perusahaan-perusahaan swasta maupun BUMN fokusnya di hibrida saja.

Nah kemudian terkait dengan pendataan tadi Pak untuk memastikan sawah-sawah kita ini ya, tadi ada keluhan-keluhan terkait dengan kondisi tersier, kondisi primer, sekunder, ya kuarter. Nah ini dengan adanya normalisasi harapan kita indeks pertanaman kita bisa ditingkatkan ke depannya.

Kemudian juga disinggung terkait penanam padi gogo di dalam berkontribusi terhadap produksi padi kita. Ini saya sangat sependapat karena apa, di lahan kering itu sesungguhnya di awal-awal awal musim kemarau, di awal-awal musim hujan itu sangat dimungkinkan kita untuk nanam padi Gogo. Saya pernah menyampaikan banyak contoh-contoh yang sudah kita lihat di lapangan, sebelum tanam singkong jadi lahan kering yang tanam singkong yang panen di bulan Agustus setelah itu dia tanam padi gogo dulu. Padi Gogonya mereka menggunakan jenis hibrida Pak, hibrida yang biasa ditanam di sawah ditanam di lahan kering ternyata hasilnya mendekati 6 ton Pak 6 ton ini sangat luar biasa. Padi Gogo perlu dihidupkan kembali menggunakan lahan-lahan yang sudah existing selama ini baik ubi kayu maupun lahan-lahan apa namanya jagung dan kedelai ya.

Saya kira ini sekedar tambahan dari saya. Saya akhiri.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Wa'alaikumussalam.

Terima kasih Pak Hanan. Itu tidak hanya sekedar banyak maksudnya banyak kadar.

Baik, selanjutnya Pak Andi Akmal. Setelah ini, terakhir Bu Saadiah.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV saya hormati,
Pak Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I, Kepala Badan Pangan Nasional, Bulog dan dari BUMN, Bapak Ibu sekalian berbahagia.

Saya tidak berpanjang lebar. Yang pertama kalau kita melihat 2023 Pak Menteri ya *Alhamdulillah* penyerapan cukup besar Pak ya 96,7%, walaupun memang anggarannya berkurang. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat 2024 ini dengan adanya *refocusing* ternyata *Alhamdulillah* membawa kenaikan produksi kita Pak. Ini yang bicara BPS, bukan Komisi IV bicara Pak ya. Tentu dengan program OPLA, pompanisasi dan juga pupuk, yang agak sedikit menyedihkan kita karena dengan program peningkatan produksi ini ternyata anggaran kita pagu indikatif 2025 karena tinggal 7,9 triliun.

Saya kemarin di Banggar Pak Menteri, marah saya di Banggar kemarin karena kenapa Kementerian Pertanian yang sangat besar ini mengurusi rakyat kita anggarannya dipotong setengah. Ini gila Pak 32 triliun sekarang tinggal 7,9%. Saya 10 tahun di Komisi IV, ini sangat menyedihkan. Ini masih ada waktu Pak Menteri dan saya pribadi mendukung kita nanti kesimpulan untuk setuju untuk penambahan apa namanya anggaran 68 triliun.

Tadi mungkin ada sedikit dari Pak Slamet bahwa bukan hanya masalah penambahan lahan Pak ya tapi banyak program sebenarnya 68 triliun ini. Ini mungkin teman-teman Pak Menteri saran saya disampaikan kepada kami Pak apa saja 68 triliun ini sehingga ini bisa kita pahami bersama Pak.

Kalau untuk makan gizi itu Pak, Pak Ketua di Banggar itu sudah disiapkan anggaran 71 triliun Pak nah masuk di sini. Nah anggaran APBN 2025 ini anggaran transisi Pak, jadi pasti nanti tahun depan ini ada APBNP perubahan. Di situ saya kira Pak Menteri peluang bagi Kementan. Kita mendoakan Pak Menteri bisa melanjutkan kembali untuk menaikkan anggaran

sampai ya 60 triliun, minimal 50 triliun lah sehingga apa menjadi harapan kita semua ini bisa terwujud ya Pak ya, itu yang kedua.

Yang ketiga ya yang terakhir ini Pak, hilirisasi pertanian. Ini sebenarnya sudah kita mulai kemarin Pak, cuma memang ada beberapa bantuan kemarin sudah ada gudangnya belum ada mesinnya. Saya kira perlu tahun depan di apa namanya terutama apa namanya pengering ya, ini pengering sudah ada gudangnya tapi belum ada mesinnya. Karena itu, saya kira bagian daripada bagaimana kita memperbaiki apa namanya peningkatan kesejahteraan daripada petani kita Pak, hilirisasi pertanian.

Yang terakhir Bulog ini Pak, Direktur Utama Bulog Pak keluhan kita selama ini. Selama ini kita sibuk berbicara masalah hulunya Pak ya peningkatan produksi tapi hilirnya Pak. Saya lihat di sini mungkin Badan Pangan Nasional Menteri Perdagangan Bulog ini di mana ada kepastian pembelian pangan kita Pak. Petani ini akan bersemangat menanam kalau ada kepastian kalau perlu Pak kontrak. Bulog ini kan punya cabang di semua kabupaten Pak ya, kenapa kita enggak kontrak saja dengan petani kita gitu? Pada saat panen jagung ini jangan harganya di bawah HPP. Jadi salahkan Kementan Pak salahkan anggota DPR. Padahal ini kan sebenarnya bukan domainnya di hulu. Saya kira ini Badan Pangan Nasional Pak ya Pak Arief ini Pak dipikirkanlah Pak gimana ke depannya ini ada kepastian pembelian bagi petani kita terutama jagung Pak.

Di daerah saya ini penghasil jagung, pada saat panen harganya anjlok Pak di bawah HPP Rp2.000 Rp3.000 Pak. Padahal HPP-nya 5.400 begitu. Ya Pak ini harapan kita Pak sama Bulog dan Bulog selama ini sudah cukup bagus cuma bagaimana ini kepastian pembelian dan ada *off-taker*-nya pembelinya Pak atau BUMN kita ini Berdikari ini. Daripada Berdikari enggak jelas kerjanya, mending kerja sama dengan peternak kita kontrak pembelian ternak daripada masyarakat kita gitu. Nah itu benar-benar Pak, baru ada kepastian. Kalau tidak Pak, bagaimanapun perbaiki di hulu Pak kalau dengan kepastian pembelian harga agak susah kita Pak. Ini ini pengalaman saya sebagai orang kampung Pak, ini orang di lapangan ya merasakan seperti itu.

Saya kira demikian dan terakhir Pak, saya ingin minta maaf kepada kita semuanya bila selama 10 tahun ini ada kekurangan ada mungkin kesalahan, ya karena untuk berikutnya lagi kita ada kerjaan yang lain pak. Demikian, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Tepuk tangan ini artinya doa buat Bang Andi, sukses lancar dilantik jadi Bupati Bone eh Bone.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Wakil Bupati.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Eh eh wakil bupati, wakil bupati.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jangan menyalahi aturan.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Yang namanya lagi semangat-semangat, kalau lihat Bang Andi kan semangat, jadi ikut semangat kita. Silakan Bu Saadiah.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Terima kasih Bu Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Pimpinan dan anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Wamen beserta para jajaran Eselon 1, Kepala Badan dan Bapak Ibu dari Kementan yang saya hormati.

Tentu kami dari Komisi IV selalu memberikan *support* ya kepada Kementan untuk bisa..., terutama anggarannya ini Pak Menteri kita terus terang sangat prihatin ya dengan turunnya anggaran dan kita berharap di tahun-tahun ke depan Kementan bisa dialokasikan anggaran sesuai dengan tupoksinya yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat terutama oleh petani-petani kita, Pak.

Yang pertama ini saya membaca apa yang dipaparkan tadi menyinggung sedikit soal opini BPK dan tantangan pertumbuhan sektor pertanian, Pak Menteri. Di tadi juga sudah disinggung bahwa opini BPK terhadap Kementan tahun 2023 Wajar Dengan Pengecualian ya WDP. Nah ini menandakan bahwa adanya beberapa masalah dalam pelaporan keuangan yang perlu diperbaiki dan mungkin juga salah satu tantangan utamanya yang dihadapi sektor pertanian adalah dampak fenomena El Nino. Nah, sehingga ya saya mungkin secara pribadi mengambil kesimpulan bahwa masalah iklim menjadi salah satu tantangan utama yang perlu dihadapi oleh Kementan di tahun-tahun ke depan Pak.

Saya ambil contoh Pak, pembangunan irigasi besar di Buru, Pulau Buru Pak. Ini dengan alokasi anggaran yang sangat besar. Nah di musim penghujan kemarin jebol irigasi itu sehingga mengakibatkan seluruh daerah-daerah sawah di pulau Buru yang menjadi salah satu apa namanya subsidi apa namanya

daerah-daerah ketahanan pangan daerah persawahan tanaman pangan di sana akhirnya habis dibawa banjir. Nah ini di tempat lain juga begitu Pak. Nah saya hubungkan dengan pompa Pak Menteri, ya kita memberikan apresiasi untuk program pompanisasi yang diprogramkan oleh Kementan. Namun di beberapa tempat untuk daerah-daerah membutuhkan bukan saja pompa Pak tetapi ya semacam sumur dalam gitu ya atau sumur borlah. Kalau dulu di Komisi VII ada pada saat kunjungan-kunjungan baik daerah-daerah di tanaman pangan sawah ataupun daerah perkebunan dan hortikultura mereka menyampaikan jika ada program seperti ini adalah langkah sangat bagus gitu ya.

Yang kedua soal realisasi anggaran dan pengelolaan keuangan, Pak Menteri. Di tahun 2023 ada dana dekonsentrasi 570 miliar, tugas pembantuan 1,88 triliun dan BLU dari Kementan 3,99 triliun. Nah sementara kewajiban tercatat 1,66 triliun. Nah saya memberikan catatan soal ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi Pak. Ini ada satu analisa yang mendalam mengenai apa sih hambatan-hambatan sehingga antara perencanaan dan realisasinya tidak sesuai dalam data ini Pak.

Nah, saya singgung soal DAK, yang ketiga. Ini saya buka-buka dari dokumen-dokumen ini ingin sekali Pak saya penasaran alokasi DAK reguler dari Kementan ini ke daerah mana saja, di provinsi mana saja? Karena, tentu kami semua yang ada di Komisi IV sangat berharap kalau tadi di dalam apa namanya dokumen pidatonya Pak Menteri ini disinggung soal sebaiknya melibatkan Anggota Komisi IV. Nah dalam kunjungan kami ke beberapa kabupaten banyak titipan-titipan misalnya ya dari kabupaten proposal. Nah ketika misalnya ini menjadi salah satu tugas kami sebagai apa namanya jembatan untuk melakukan atau menyampaikan aspirasi ini kita berharap bukan saja secara normatif dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa harus lewat Krisna dan seterus-seterusnya tapi apakah ada celah-celah lain untuk langsung menyampaikan sehingga ada daerah-daerah yang perlu kita *support* untuk bisa didukung alokasi anggarannya ke lokasi-lokasi ini gitu.

Nah selain tadi yang disampaikan bahwa ada juga di beberapa daerah bahkan ketika misalnya mereka tidak berhasil, Pak Menteri, menyampaikan, “Bu kalau gitu kami minta aspirasi DAK-nya Ibu”, gitu. Saya penasaran juga tidak ada DAK aspirasi kita kan begitu gitu. Nah ternyata tadi yang disampaikan bahwa ada mekanisme lewat Banggar dan seterusnya.

Nah terakhir Pak Menteri, saya singgung selalu singgung soal perkebunan Pak. Ini kebetulan kami dari daerah timur ini program untuk bibit pala dan cengkeh Pak. Di sini juga kita berharap ini muyul dan kebutuhan masyarakat permintaan ya. Permintaan masyarakat tinggi soal benih Pala dan Cengkeh ini nah saya mengusulkan dan men-*support* untuk diusulkan lagi selain Jalan Usaha Tani Pak. Nah tahun ini dihapus Jalan Usaha Tani, saya mendorong agar ke depan bisa ada alokasi untuk Jalan Usaha Tani karena ini sangat penting sekali untuk kebutuhan-kebutuhan petani baik tanaman pangan ataupun tanaman perkebunan.

Terima kasih Ibu Ketua, saya kembalikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih.

Sebelum Menteri menjawab, ada beberapa masalah yang pertama saya mendapatkan info bahwa pupuk akan..., pupuk subsidi akan dirubah mekanismenya. Saya minta dijelaskan. Yang kedua khusus SDMP ini mendapat keluhan dari para penyuluh untuk verifikasi petani yang mendapatkan bubuk subsidi itu mereka kerja bahkan sampai jam 2 pagi jam 3 pagi tetapi tidak mendapatkan honor. Misalnya kemarin kami di Tabanan, yang diverifikasi hampir 5 ribu petani. Keluhannya ya begitu kalau data misalnya 20 orang satu kelompok, satu orang saja tanda tandatangannya tidak sama dikembalikan. Jadi satu persatu baik tanda tangan maupun foto itu harus sama. Saya tegaskan lagi mereka sangat-sangat kesulitan. Apalagi saat ini banyak penyuluh yang sudah pensiun ya.

Yang kedua, saya juga mau mendengar penjelasan jangan ada uji coba. Misalnya dulu di zaman 2009--2014 Pak Suswono coba program Kartu Tani di Kerawang, gagal. Kemudian Kartu Tani lagi gagal lagi dan ini infonya akan diganti dengan uang tunai ditransfer langsung dari Kementerian Keuangan ke petani melalui bank. Saya minta tolong benar-benar dicek ulang, dipastikan bahwa jangan sampai uang subsidi dari pemerintah ke petani itu bukan menjadi pupuk tetapi menjadi yang lain-lain. Bahkan, infonya transfernya itu *virtual account*. Nah apakah, apakah semua petani di wilayah terpencil mempunyai rekening? Jadi nanti tolong dijelaskan secara singkat.

SDMP juga saya ingatkan ya penyuluh banyak mengalami kesulitan ya. Kalau enggak salah di SDMP dulu ada pinjaman hibah luar negeri ya? Ada kan? Itu dilaporkan enggak ke Komisi IV. Tidak dilaporkan Menteri, harusnya yang nama pinjaman luar negeri tetap dilaporkan ke Komisi IV karena itu ada uang yang masuk yang dikelola oleh kementerian.

Silakan Pak Menteri mau menjawab yang tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman, singkat jelas saja kan kita masih ada nanti pendalaman dengan Eselon I, kemudian pengambilan keputusan untuk diserahkan ke Banggar. Kami persilakan.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Terima kasih Pak Ketua.

Kami mulai dari Pak Ketua. Masalah pupuk subsidi memang ada rencana pilot proyek tapi di Babel itu tapi saya kira maaf Pak Ketua, karena kita tidak tahu siapa menteri berikutnya, ini agak berat. Dulu kami Kartu Tani, kami yang minta sebelum kami tinggalkan kami minta dihentikan karena banyak saudara kita yang tidak bisa dijangkau oleh signal dan seterusnya itu tidak bisa

dapat pupuk di perbatasan. Jangan kita bayangkan bahwa berada di kota semua sehingga ada 17% sampai 20% enggak bisa dapat pupuk enggak bisa akses karena Kartu Tani. Jadi kemarin kami langsung, KTP selesai kita permudah.

Kemudian verifikasi kami setuju Pak Ketua memang anggaran kami sangat terbatas. Kami sudah berikan PPL, kemarin 300 ya? 300 totalnya 300 di di SDM 300 M ya.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

BOP-nya 400 ribu?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Ya 400 ribu.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Plus pulsa 100 ribu.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Uang pulsa.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Begitu kan?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Namun ke depan...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tapi kalau bisa di anggaran akan datang ya ditambah untuk verifikasi tadi itu...

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Kami masukkan lagi Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Yang masalah pupuk karena kalau saya tanya Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia tidak mengalokasikan anggaran tersebut.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Nanti kan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Karena penyuluh kan di Bapak.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Iya kami anggarkan lagi Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya minta tolong ya karena keluhan mereka di setiap kami turun pasti masalah kerjaannya *double* bertambah tetapi pendapatannya pas-pas saja.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Bahkan dulu tidak ada nol. Kami setelah datang kami tambahkan 300 rupiah eh 300 ribu per bulan dengan biaya pulsa 400-an.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oke lanjut.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Kami lanjut, Pak Ketua.

Penurunan produksi izin Pak Ketua kami sampaikan Pak Endro tadi penurunan produksi Pak kita tahu bahwa *El Nino* terjadi *overlap* dengan kekeringan, tegas Oktober sampai Agustus sampai baru-baru ini 1 Agustus Juli. Kemudian ada surat tertulis dari BMKG dan ditembusi ke Presiden, tembusi seluruh Menteri. Kami sampaikan di publik bahwa ada tekanan. Kalau kita tidak lakukan pompanisasi Pak dengan OPLA, dua ini kami pastikan sekarang katakanlah impor 3 juta itu bisa 5 juta 7 juta. Waktu Pak Badan Pangan minta 5 juta ya Pak Arief ya, enggak awal itu saya katakan 3,6 saya katakan 5 juta pun kita harus siapkan. Kami dulu anti-impor tapi melihat kenyataan lapangan terlalu banyak masalah yang kita hadapi. Jadi kami sampaikan sekali lagi Pak, iklim bisa ditunjukkan iklim *El Nino* ekstrem dan *overlap* dengan kekeringan. Ini sangat ekstrem. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ada kondisi iklim yang tidak biasanya terjadi. Kita tanam, tiba-tiba kering dan itu menghantam ribuan tanaman karena kami di lapangan Pak Endro.

Kemudian, kami singkat-singkat saja Pak Ketua. Ini iklim ekstrem yang terjadi. Kemudian Pak Khalid pompa sudah banyak Pak, Pak Khalid ya di Aceh, pompa sudah banyak Pak Bapak banyak kemarin kami tambah seribu jadi mestinya 1.300 sudah tiba di lapangan tujuh ratus. Kami respons cepat karena ada potensi air langsung kami..., kami cuma tiga hari ya Pak Dirjen, tiga hari kami sudah kirim. Iya Pak sama-sama Pak.

Nah ini masalah yang 50 juta, ini Pak Firman tadi enggak ada ya? Tolong di BSIP kalau bisa difasilitasi kalau anggaranya memungkinkan kita yang BSIP diperhatikan ini Bu Santi oh BSIP.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Menteri saran saya itu kan tadi Pak Firman ngomongnya di UGM. Kalau gitu nanti BSIP harus aktif ya. Justru BSIP yang harus aktif jadi uji pengecekannya di BSIP ya.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Tolong BSIP aktif.

Kemudian ini 68 triliun, Pak Ketua, fokusnya itu bukan cetak sawah saja, irigasi jaringan irigasi sekunder tersier agar dia nyambung dengan bendungan dam yang dibangun 64 unit tapi ini tidak nyambung turun. Ini sia-sia ini harus dari dari dam sampai ke bawah. Itu yang kami anggarkan. Saya..., benar dikatakan tadi teman-teman bahwa kalau tidak ada irigasinya tidak ada diperbaiki irigasi enggak ada gunanya itu benih. Inilah kami anggarkan di sini Pak. Kalaupun nanti di Kementerian PU enggak masalah tapi kami harus program karena yang berkepentingan pada air kami. Jadi itu yang 64 sudah dibangun ini sia-sia kalau kita tidak teruskan Pak Pak Ketua. Kemudian tersier ada...(interupsi).

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Mohon maaf Pak Menteri. Tersier berarti yang dibangun yang dianggarkan?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Lain, lain. Ada sekunder.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Sekunder?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Sekunder, ada tersier. Tersiernya ada 3 juta.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Dari mulai sekunder itu tetap dianggarkan?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Supaya nyambung ke bawah. Jadi kami koordinasi dengan Menteri PU jangan saya katakan percuma tersiernya kami beresin tapi tidak ada air dari atas, sehingga kami minta kami inisiatif untuk menganggarkan karena kami tanya di sana belum ada anggarannya.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Ya pasti harusnya di PU ya?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Iya. Kemudian cetak sawah, benih, Alsintan saya kira itu Pak Darori tadi Pak 68T bukan berdiri sendiri. Jadi betul-betul holistik dari hulu mulai benih sampai air sampai pupuk kita perhatikan semua. Ada pompa nanti kami cek Pak Hermanto pompa tahun 70-an bila perlu kami ganti, kami berikan pompa satu yang besar yang 8 inci Pak.

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Ya interupsi sebentar Pak.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Kalau memang ada masih ada potensi air.

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi sebentar. Karena di situ sudah ada bantuan kita juga cuman bantuan pompa itu hanya memenuhi 25%. Jadi kalo misalnya ditambah lagi pompa yang lebih bagus.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Kami... nanti kami tambah Pak. Kami...

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Nama daerahnya Sumani, Kabupaten Solok.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Pak Direktur langsung ya karena itu jumlah kecil.

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Nanti ditinjau saja, itu ada juga berkah Pak Menteri di situ.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Iya Pak. Pak Hanan, Pak Hanan Pak, minta maaf Pak kalau aku klarifikasi, Pak Ketua ya. Swasembada 84 itu tanggal 10 November 1984 Pak Harto menerima penghargaan swasembada. Swasembada definisinya adalah impor 10% maksimal. Waktu itu impor 414 ribu ton beras, kemudian penduduk 100 juta lebih. Swasembada di era pemerintahan sekarang itu 3 kali 2017, 2019, 2020 dan itu tidak ada impor beras medium penduduknya 200 juta Pak hampir 2 kali lipat. Artinya apa? Upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasikan dengan tahun 1984. Jadi Pak Harto hebat, sekarang pemerintahan kita hebat karena ada jejak digital bahwa kita swasembada tiga kali Pak.

Kemudian WTP Pak, izin Pak, WTP itu terjadi di 2016 pertama dalam sejarah pertanian dan itu di era kami dengan teman-teman ini semua dan WTP tujuh tahun dilanjutkan. Nah kenapa ini WTP-nya Pak itu mulai 2016 dan di saat kami dengan teman-teman. Jadi jangan sampai..., Bapak pasti mengerti tapi media ditulisnya, “nanti ini rusak ini pekerjaannya menteri ini yang bekerja tujuh bulan”. Jadi kami mengingatkan Pak, jangan sampai teman-teman media di atas tulisnya cuma *statement* Bapak kita repot ini menjawabnya lagi. Ya jadi satu ini Pak kita dapatin WTP dan anti-gratifikasi terbaik tiga kali, pertama juga diterima pertanian waktu itu. Kami sudah diskusi WDP kami terima Pak, kami harus terima kami tidak bisa jelaskan karena orang yang selalu membahas masa lalu itu rugi Pak. Kita membahas gagasan membahas masa depan.

Kemudian 7 triliun sudah Pak kita blak-blakan saja. Saya setuju Pak ini kalau kalau dimasukkan di kesimpulan. Enggak mungkin 7,9 triliun ini sama dengan membunuh pertanian. Jadi mimpinya mau terbang tapi mesinnya dicabut. Kalau pesawat. Jadi enggak mungkin Pak Ketua.

Terima kasih

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tapi saya khawatirnya gini, anggaranya turun tapi produksinya tetap terus. Kan selalu begitu dari 23 jadi turun tapi apa produksinya tetap saja enggak turun-turun nih? Dianggapnya Kementerian Keuangan cukup.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Saya mengaku turun Pak, sudah turun kan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak supaya jelas ini.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya toh kan biasanya kalau turun berarti produksi turun. Iya kan? Ini tiga kali turun tapi produksinya tetap. Dianggap oleh Ibu Sri Mulyani enggak dikasih duit pun bisa lu jalan kan gitu.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Jadi jangan sampai aku ditagih Ibu Sri Mulyani karena ditambah 1 triliun. Izin Pak Ketua, karena banyak yang menganalisa itu hanya di ujung. Padahal ini bisa kita bedah perjalanan 8 bulan 7 bulan. Coba tunjukkan yang tadi. Izin Pak Ketua ini perlu dijelaskan karena di media sering berpolemik padahal kita ini kerja nonstop, kami tidak ada Sabtu--Minggu. Kami rapat Sabtu--Minggu tidak ada hari libur, kami minta sampai Desember karena ini kritis ini adalah musim kering. Izin Pak Ketua kami ulang. Ini ini tandanya bahwa anggarannya kurang baterainya pun enggak bisa hidup nih ya sudah. Ya izin Pak Ketua ini Agus ini coba kita perhatikan September itu 2,8 juta ton. Sebelumnya tidak pernah terjadi selama 10 tahun di bulan September karena kita gerakan pompa tadi karena kemudian gerakan OPLA, tidak pernah terjadi 10 tahun. Ini lima tahun yang terbaca di sini. Kemudian Agustus 2,8 juta ton itu tiga tahun terakhir empat tahun terakhir tertinggi. Kemudian Oktober prediksi baru-baru ini, ini data BPS kami tidak akan mengeluarkan data lagi. Kami sudah sepakat minta tidak ada boleh mengeluarkan data lagi dari Kementerian Pertanian kita sepakat mengacu pada BPS. Nah ini di Oktober diprediksi juga 2,5 ini tertinggi selama lima tahun. Nah inilah hasil pompa kita. Nah ini ada orang yang menyampaikan ini minus minus minus, kalau kita tidak ada gerakan, bayangkan Pak 1 juta ton 3 bulan ini hilang dan ini ke depan *Insyaallah* pasti lebih baik. Nah orang yang hanya melihat diujung minus minus, dia tidak pernah bahwa ada El Nino overlap dengan kekeringan. Kalau ini kita tidak lakukan gerakan Pak itu 5 juta sedikit kita impor.

Nah jadi kita ini data jadi ini tidak bisa lagi polemik karena datanya KSA BPS yang keluarkan jadi bukan data dari kami. *Alhamdulillah* tiga bulan berturut-turut selama pupuk Juli--Juni masuk mulai bekerja kemudian pompa juga mulai masuk dengan segala risiko yang kami..., tahu Bapak-Ibu ada dua undang-undang kami minta maaf kami harus koordinasi dengan PU, itu sesuai undang-undang air tidak boleh disedot dari dari sungai enggak boleh tapi kami minta di sana kami sampai didebat, Pak Menteri, kita ini koordinasi ini tidak bisa disedot ini undang-undang. Saya katakan kenapa tidak bisa disedot? Karena ada biota di sana dijaga. Saya bilang pilihannya ada manusia yang saya jaga dua pilihannya biota atau manusia. Tinggal itu pilihan Bapak Presiden mengatakan sudah dahulukan dulu ini karena manusia yang dijaga. Akhirnya dan kami ribut dengan BWS di lapangan. Menteri sudah *oke* tapi di lapangan tidak semudah itu. Mereka jaga airnya supaya biota jangan sampai korban.

Kemudian ada lagi satu Pak, kami membeli pompa tapi tidak ada TKDN-nya harus 40 ya? 40 Pak. Kami minta lagi Kapolri, Kejaksaan, KPK Pak daripada Bapak periksa saya dari awal ini salah tapi kalau Bapak mengatakan tidak boleh, kita umumkan bahwa ini tidak boleh biar tidak tanam padi. Akhirnya setuju kita MOU, *Alhamdulillah* jalan. Jadi ini hasilnya karena aku lihat ada *statement* beberapa di media tidak paham tapi lebih pintar. Padahal kita ini kerja tidak tidur ini sudah tidak ada lagi maaf tadi malam, sampai malam ya

kami rapat. Saya ngerti dan ada keluhannya Pak Ketua, tapi Pak Ketua yang bisa putuskan keluhannya, kenapa tidak ada honornya. Saya bilang, “Sabar Bapak, kan ikhlas untuk Merah Putih”. Dia bilang. “Ikhlas, ikhlas, ikhlas tapi jangan begini-begini jangan keterlaluan.”

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Eselon I saja minta tambahan honor, apalagi penyuluh di lapangan.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Jadi jawabannya Pak Ketua ini luar biasa. Nah dengar itu Pak Sekjen. Sebenarnya bukan Pak Sekjen yang minta. Siapa sih yang minta kemarin? Tidak tidak minta sih, cuma bercerita bahwa “Pak, ini sewa mobil sekian, uang makan.” Karena dia dapat 160 ya? 160.000. Tapi, saya bilang, “Jangan, kalau Merah Putih memanggil, kita bekerja enggak usah pikir gaji, enggak pikir macam-macam, kita berbuat.” Karena ini yang diajarkan oleh Pak Ketua, Pak Sudin.

Saya kira, eh izin DAK. Ini memang DAK ini dibatasi, Ibu, Bu, Bappenas. Bappenas batasi, jadi kita tidak bisa gerak. Jadi bukan dari kami. Ini ada dari penetapan menu lokasi oleh Bappenas. Jadi Ibu mungkin ada jaringan ke Menteri Bappenas, kan Pak, ada PKS di sana juga, ditanyalah ke hubungannya Bappenas, kok digituin Menteri Pertanian.

Ya kenapa?

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

... (suara tidak terdengar).

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pakai mic, pakai mic, pakai mic supaya nanti direkam.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Sudahlah Pak, pompa saja yang ada saja Bapak minta daripada janji macam-macam.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Bukan, bukan, bukan. Kita perlu tahu juga karena seperti Bu Saadiah juga sampaikan bahwa di saat kita turun, dinas jumpa sama kita memberikan proposal dan sebagainya.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Hanya 20 Pak, 20 Kabupaten seluruh Indonesia.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Bukan. Skema pengambilan keterlibatan kita Kementerian Pertanian sejauh mana, apakah dengan Banggar langsung dengan Bappenas?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Oh ini ada bisa Pak bisa. Bisa tapi tadi mengatakan agak runyam ya mungkin. Jadi pengusulan DAK aspirasi DPR melalui Banggar kepada Kementerian Keuangan direncanakan bulan September 2024, Pak, jadi Bapak bisa.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Keterlibatan Kementerian Pertanian pertanyaan saya.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Bapak...

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Dalam DAK tersebut.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Kalau kita usulkan tapi bisa Bapak ini *direct* juga. Nah, kita dikasih jatah hanya 20 kabupaten. Ada datanya dan ini ada Pak ada kabupatennya disebut-sebut Humbang. Saya sebut saja Pak Humbang, Bengkalis, Meranti, Banyuasin, Garut. Ini enggak ada Sulsel Pak, padahal saya menteri dari Sulsel. Jadi begitu demokrasinya ini Menteri Pertanian Pak, main-main dikit Pak, ini ini yang banyak di Sumatera ini. Mungkin dari Bappenas ada deputinya di sana Pak. Jadi tidak ada Aceh, maaf Pak, tidak ada Aceh.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Maksud saya begini Pak tadi, karena yang lebih paham situasi pertanian kan kita.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Iya betul.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Seperti maaf sekali lagi,

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Iya.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Dari dulu kita di Komisi IV meminta agar jaringan tersier jangan di PUPR, karena yang tahu mana sawah belahan baku tanam dua kali setahun kita tapi di PUPR. Kita juga punya teman di PUPR di Komisi V. Begitu kita lihat di lapangan, tidak *variable* tidak *connect* dengan kebutuhan kita lapangan. Begitu juga ini kan yang paham pertanian kan Menteri Pertanian.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Pak Khalid, Pak Khalid saya jelaskan tersier itu di Kementerian Pertanian. Tersier di sini, sekunder di sana.

F-P. GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):

Selama ini mohon maaf Pak, apa namanya istilahnya P3AN entah mereka punya itu namanya?

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Enggak, saya jelaskan. Tadi Pak Khalid mengatakan tersier itu bukan di sini, tersier itu di Kementerian Pertanian. Maka, tadi saya Pak Menteri konsultasi sama Pak Wamen tadi di atas saya jelaskan, seharusnya Dirjen Sumber Daya Air itu dikembalikan Kementerian Pertanian.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Iya betul, betul.

F-PDIP(KETUA/SUDIN, S.E.):

... tetapi kalau pekerjaannya itu tergantung pemerintah mau di PU mau di mana ya terserah karena yang butuh pengairan untuk sawah adalah Kementerian Pertanian. Betul kan? Nah, itu saja Pak Khalid.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ketua, ketua, ini masalah DAK bisa enggak saya tambah ke sedikit? DAK ini memang, sedikit Pak Menteri. DAK ini memang kita juga di Banggar agak kesel juga sebenarnya Pak karena kementerian teknis enggak dilibatkan. Hanya di menunya saja sebenarnya. Menunya, angkanya, daerahnya, itu Bappenas sama Menteri Keuangan, Ketua. Ini supaya teman-teman yang bukan Banggar bisa memahami karena kebetulan saya di Banggar. Jadi ini memang betul menteri teknis tidak terlibat apa-apa di sini karena yang banyak menentukan itu hanya ya Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan. Disiapkan Kementerian Pertaniannya menunya Pak, menu dan apa namanya ya menunya ya angkanya semuanya dari sana. Nah seperti itu Ketua saya sedikit

penjelasan supaya ini masalah DAK ini tidak berpanjang lebar apa namanya perdebatannya begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya lanjut.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Dua menit, dua menit Pak Ketua, izin kami tampilkan sedikit karena banyak menanyakan tadi mana luas areal rencana 1 juta. Sebenarnya kami sudah menggarap sebagian dengan OPLA, ini coba kami tunjukkan. Ini mungkin nanti bahkan kami buat *blueprint*-nya 2025 sampai 2029 dan kami yakin dalam waktu satu bulan ini bisa selesai, baru kami serahkan nanti untuk ditindaklanjuti.

Next, ini sudah berjalan ini, *next.* Merauke langsung saja ke Merauke, Merauke langsung Merauke dua saja, Merauke *next* ini ini Merauke kami sudah di sana dulu kita ada cetak sawah ternyata berhasil. Ini Merauke sekarang ini sudah tanam 20 ribu hektar sekarang. Dalam waktu dekat itu 40 ribu hektare Merauke ini berhasil. Nah di sini ada 1 juta hektar lebih kalau ini tadi dipertanyakan.

Kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah ini SID-nya digarap ini daerahnya 1 juta ini sangat cocok untuk bahkan ada yang menarik ini betul-betul berkah bagi Indonesia ada danau di tengah dan air tawar di tengah 1 juta itu luasnya 100 ribu hektar, danau besar eh bukan Merauke, 100 ribu hektar dan ini bisa mengairi sepanjang masa. Ini mungkin berkah untuk Indonesia. Ini rancangannya ada 3 juta hektar, kita tinggal pilih 1 juta, kalau 1 juta kita dua kali tanam karena kita *full* mekanisasi nantinya ini sudah memulai 100 ribu hektar Kalimantan Tengah dan 100 ribu hektar Merauke sudah tanam. Kenapa? Kami ingin supaya yang melanjutkan nanti ini tidak ada lagi alasan ini tidak dilanjutkan. Lahannya ada sudah tanam sudah panen ini tunjukkan waktu kita panen baru-baru ini, *next.*

Nah ini Merauke ini, *next* 40 ribu hektar ini berhasil kami semua menggunakan alat mesin pertanian. Ini Bapak Presiden kunjungi dan beliau mengatakan produksinya ada sampai 8 ton, ada sampai 10 ton, tanahnya subur. Nah dulu ini yang kita program waktu sama-sama Pak Ketua masih Bapak itu 2016-2017 cuma dihentikan bahwa dengan alasan dulu, maaf kami buka dengan alasan kami tidak usah sebut, sudah disetujui tapi tiba-tiba dihentikan mengatakan bahwa ini tidak perlu kita tanam cetak tanam padi karena kita bisa impor. Saya katakan waktu itu, “Pak kalau ada beras, kalau tidak ada?” Apa yang terjadi sekarang, 22 negara menyetop ekspor. Ini terjadi yang kami prediksi enam tahun yang lalu tujuh tahun lalu. Sekarang ini ini kita rintis dari awal. Ini panjangnya 2 140 kilometer. Jadi Pak Ketua yang tadi diragukan teman-teman lahannya, ada anggarannya ini disetujui ini jalan karena sudah di Merauke sudah sepersepuluh sudah beres tinggal dilanjutkan.

Kalimantan, *Insyaallah* dalam tiga bulan sepersepuluh beres, eh *sorry* seperlima beres karena 500 ribu tapi 100 ribu kita beresin.

Jadi enggak ada alasan tidak lanjut. Maaf mungkin teman-teman Dewan ada kami ngambil traktor bawa ke sana. Kenapa? Enggak ada orang, enggak ada tenaga kerja. Makanya kemarin sempat di Rakortas dan Ratas, “Pak Amran, enggak mungkin, enggak ada orang.” Kalau 2 HOK per hektar, berarti itu 2 juta orang yang harus dikirim. Saya bilang Pak, “Kalau bukan teknologi, enggak, kalau tidak mungkin kita lakukan.” Semua pakai mesin di sini Pak Ketua, dan sudah tanam. Tadi, tunjukkan yang tanam. Sekarang sudah panen itu 20 ribu hektar, *Insyaallah* tiga bulan 40 ribu hektar. *Insyaallah* kami bisa serah terimakan nanti dan bisa bereskan nanti sebelum pelantikan Presiden terpilih bahwa ini bisa dijalankan dan tidak ada alasan dihentikan apalagi di saat sekarang. Jadi *Insyaallah* Indonesia tidak akan kekurangan pangan mimpi kita ke depan dengan catatan 68 triliun disetujui.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi zaman dulu ada namanya *Food Estate* di Kalimantan Tengah, gagal total. Kemudian ada MIVE (Merauke *Integrated Food Estate* dan *energi*) gagal total juga. Jadi, kita harus belajar dari dua hal tersebut. Kenapa bisa gagal? Kenapa bisa berhenti? Pelajaran ini sangat mahal sekali bagi bangsa kita, maka harus kita lihat kita pelajari supaya jangan gagal lagi. Itu saran saya.

Kemudian masalah tadi saya mau dengar dari PI masalah pupuk subsidi yang akan diganti dengan uang ditransfer melalui *virtual account.* Saya minta penjelasan secara singkat saja karena saya sampai hari ini belum bisa memahami itu.

Silakan.

DIREKTUR UTAMA PUPUK INDONESIA (RAHMAD PRIBADI):

Mohon izin Pak Menteri, Pak Mentan, Bapak Pimpinan Komisi IV dan seluruh Anggota.

Jadi mohon izin, yang rencananya akan dilakukan uji coba di Bangka Belitung itu hingga saat ini memang belum ada arahan yang secara konkret nanti akan seperti apa. Namun dapat kami sampaikan pada saat sekarang memang pola pencairan pupuk subsidi itu sudah dicairkan berdasarkan NIK dan *virtual account* tapi kami yang menagihkan. Itu barangkali itu yang sekarang diasumsikan nantinya akan seperti demikian pada saat BLP.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau kendala-kendala seperti saat ini yang dialami oleh petani, misalnya satu kelompok 20 orang yang satu tadi saya katakan tandatangan salah atau fotonya enggak benar atau apa, bagaimana mengatasi itu? Jangan karena satu orang tanda tangannya, mohon maaf ini ya kan petani kadang-kadang di kampung jarang tanda tangan, enggak seperti Dirut PI mungkin satu hari seratus yang ditandatangan. Kalau petani kan setahun belum tentu sekali. Bagaimana mengatasi ini? Coba saya mau dengar dulu ini gimana supaya karena keluhannya itu tanda tangan beda sedikit tolak. Yang ditolak bukan cuma satu tapi satu kelompok 20 orang ini. Coba bagaimana caranya?

DIREKTUR UTAMA PUPUK INDONESIA (RAHMAD PRIBADI):

Baik.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Petani bilang, “Kok pemerintah ini menyulitkan.” Dianggapnya kan begitu, padahal pemerintah tidak menyulitkan tetapi agar tidak ada penyelewengan dan tepat sasaran. Silakan.

DIREKTUR UTAMA PUPUK INDONESIA (RAHMAD PRIBADI):

Baik, mohon izin Pimpinan. Jadi memang juknis pertama kali itu dikeluarkan pada bulan Maret dan hingga bulan Juni ini sudah dilakukan revisi tiga kali. Artinya kami bersama dengan Kementerian Pertanian ini secara aktif untuk terus mengkoreksi beberapa kesulitan yang ada di lapangan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pimpinan, tanda tangan, kemudian foto dan beberapa hal lain yang di lapangan ternyata menyulitkan. Kami bersama Kementan secara aktif melakukan revisi dan hingga saat ini sudah ada tiga kali revisi Bapak. Jadi memang masih ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Mohon izin kalau diizinkan nanti Direktur Pemasaran akan menambahkan. Tapi, pada prinsipnya kami dengan Kementan sangat aktif Pak, jadi dari Maret hingga Juni sudah tiga kali direvisi dan itu semua untuk mempermudah, Bapak. Kira-kira demikian, mohon izin Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Silakan.

DIREKTUR UTAMA PUPUK INDONESIA (RAHMAD PRIBADI):

Terima kasih, cukup Pak. Ya cukup Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Dari PSP saya mau tanya bagaimana kesulitan-kesulitan itu supaya

petaninya lebih gampang mendapatkan pupuk?

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (ANDI NUR ALAM SYAH):

Izin Pak Ketua kami sudah jadwalkan dengan PIHC minggu ini untuk segera membicarakan hal ini untuk mempermudah kembali prosedur-prosedur yang ada. Kami juga akan mengajak Inspektorat dan BPKP sehingga dalam audit nanti tidak bermasalah dengan seperti tadi tanda tangan dan lain sebagainya. Kami tentu akan mencari jalan keluar dari semua ini Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Contohnya gimana? Contohnya kalau besok kan nanti kalau saya ke lapangan nanti ditanya petani gimana contohnya supaya dipermudah tetapi juga kepengawasannya *full* supaya jangan ada penyimpangan. Coba saya mau tahu contohnya gimana.

DIRJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN (ANDI NUR ALAM SYAH):

Tentu pengalaman-pengalaman yang kemarin Pak, akan kami pertimbangkan termasuk dengan penggunaan KTP. Dan tanda tangan itu akan kami coba identifikasi lagi sehingga mitigasi kesulitan ke depan itu bisa kita atasi Pak. Jadi mudah-mudahan dengan penggunaan KTP itu menjadi pilihan kita ke depan Pak, bagaimana apa namanya supaya proses ini dianggap dalam audit nanti tidak bermasalah ini yang mungkin kita atur nanti Pak. Pilihannya masih lebih pilihannya pasti ke KTP itu Pak, penggunaan KTP.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Tambah sedikit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya silakan.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Pak Ketua, ini benar sebenarnya Pak Ketua, kadang petani itu dibuat sulit bahwa disela macam-macam. Ada pikiran kami, kami akan bongkar ini. Kalau masih ada waktu, kan masih ada dua bulan ini, eh satu bulan lebih lagi saya menjabat anu resmi. Ini, itu kami ingin Satker...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Resmi di periode ini maksudnya?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Jangan dulu Pak Ketua, hilang konsentrasi saya Pak Ketua. Ini Kepala Desa kan biasa mempermainkan rakyatnya kalau dia tidak pilih dia macam-macam. Kami ingin tiga-tiga salah satu, Babinsa, Babhibnas, Kepala Desa. Kami cek apakah tidak melang..., salah satu tanda tangan itu sudah bisa dikirim, ya salah satu. Jadi, petani tidak tersandera karena biasanya ada pemilihan Kepala Desa, 50% tidak milih ini dipersulit. Nah kami ingin tiga Babinsa eh *sorry* PPL.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Satu di antara tiga?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Satu di antara empat.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Empat.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Babinsa, Bhabinkamtibmas, PPL. Mungkin larinya ke PPL semua. Nah ini nanti, Pak Ketua, kami mau ubah ini tapi memang Pak Ketua visioner menanyakan, padahal baru aku rancang. Kami sudah minta, minta ke Pak Direktur kan pernah minta kan. Sudah aku minta bongkar. Kalau bisa petani, PPL saja tanda tangan. Tidak mungkin diselewengkan dua karung, tiga karung, tidak mungkin Pak Pak Ketua, bukan sejuta ton diambil. Nah pikiran kami tinggal nanti pengawasannya daerah perkebunan seperti Sumatera Kalimantan itu saja tapi kalau daerah Jawa sangat kecil kemungkinan untuk lari ke daerah perkebunan. Bila perlu mungkin pertanian bisa enggak dibuat nanti Pak Dirut, kalau bisa dendanya 10 kali lipat atau 100 kali lipat yang mengambil pupuk subsidi oleh perusahaan, Pak Ketua. Jadi itu buat *simple,* izin bisa enggak Kadisnya enggak perlu Pak Dirut? Jangan membayangkan jauh Pulau Jawa, di Sulsel itu 80 kilo dari desa dengan kepala dinas jadi biayanya bolak balik ini besar banget Pak. Kalau diizinkan kami mau ke Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, PPL, salah satu tanda tangan sudah bisa disetujui dan kelihatan mengangguk Dirut Pupuk karena periodenya dia masih lima tahun tiga tahun.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nganggguknya karena mungkin belum dibayar kurang bayarnya.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Oh kurang bayar. Pak Ketua, terima kasih Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi kendalanya masih terjadi adalah yang mendapatkan hak harus wajib hadir. Kalau hanya mendapat dua karung wajib hadir, jarak tempuhnya yang disebut di SK Menteri 20 kilometer. Kenapa enggak jadi satu saja kelompok ya toh, kelompok ketua kelompok yang mengambil dengan tanda tangan semua anggota dan diketahui atau disetujui oleh PPL atau Babinsa atau apa yang berwenang. Ini yang paling penting. Kalau sekarang kan enggak setiap, kalau 20 orang satu kelompok mesti datang 20. Kalau waktunya sama. Kalau waktunya tidak bersamaan ongkosnya kan jauh lebih mahal. Tahunya kan kalau petani kan pemerintah mempersulit pupuk Menteri Pertanian enggak benar karena menghambat pupuk. Padahal kan ini kan untuk menjaga regulasi agar tidak terjadi penyelewengan. Pemerintah kan tidak mungkin menyulitkan petani, kan begitu ya? Jadi tolong nanti dipikirkan bisa enggak ketua kelompok saja yang ngambil tapi dengan catatan ada tanda tangan dari para anggotanya.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Dari kami sudah. Juknis terakhir kami sudah perintahkan kelompok satu saja yang ngambil yang lain ikut karena kalau mengambil setengah karung 50 kilo dia berat. Jadi kelompoknya yang mengambil ini yang bertanggung jawab, tapi yang saya maksud tadi enggak usah ke Kepala Dinas.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kejauhan memang kejauhan.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Nanti langsung ke Kepala Desa salah satu di antara empat kelompok tani, *Insyaallah* pasti lancar.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Tapi sekarang masih berlaku satu orang harus mengambil sendiri jatahnya loh masih berlaku ini.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Yang terakhir gimana? Sudah juknis.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

PI gimana? Masih kan?

DIREKTUR UTAMA PUPUK INDONESIA (RAHMAD PRIBADI):

Mohon izin Bapak, jadi memang sudah bisa diwakilkan tapi seluruh anggota harus tanda tangan. Nah ini kadang-kadang ada anggota yang sedang ke sawah Ketua, kelompoknya datang tidak tanda tangan nah mereka tidak

bisa tidak diulang lagi oleh ketua kelompoknya jadi mereka tidak dapat. Jadi ini yang tapi yang diwakilkan direvisi ketiga sudah diperbolehkan Bapak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nah sekarang tinggal begini saja sosialisasikan melalui PI, melalui distributor, melalui agen, melalui pengecer boleh diwakilkan dengan catatan harus semua anggota tanda tangan dan diketahui oleh pihak yang ditunjuk salah satu tadi salah satu dari empat tadi. Itu saja sosialisasikan. Kalau enggak kan susah juga kasihan ini petani di daerah ini ya. Bulog ada yang mau disampaikan? Cukup?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Yang tadi Ketua, kayaknya bagaimana tadi pak mengenai masalah *offtaker*nya tadi harapan kita Pak ya Bulog bisa menjadi *offtaker* kita. Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA BULOG (BAYU KRISNAMURTHI):

Baik, terima kasih Pak. Secara prinsip tugas Bulog adalah justru mengambil *offtake* itu dan yang sering menjadi *dispute* perbedaan pendapatnya adalah kualitas Pak sesuai dengan ketentuannya. Jadi kalau dilihat dari harga, semua yang di bawah harga yang ditentukan pasti kami serap. Hanya kualitas ini yang mulai dari kadar air dan yang lain. Ini memang kami terus berusaha untuk meningkatkan pelayanannya termasuk berusaha untuk mengembangkan apa pengeringan dan penggilingan. Ke depan mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bisa kami serap.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Berdikari sudah siap belum untuk masalah pangan makan gratis? Apakah pemenuhan gizinya sudah siap atau belum Berdikari? Jangan seperti sekarang ya saya mau dengarkan langsung dari Berdikari ini.

DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (MARYADI, S.E., M.M.):

Izin Bapak Ketua, Bapak-Ibu yang terhormat

Untuk Berdikari saat ini memang kesiapan kita terkait sarana kita punya RPHU yang 200 ribu ekor untuk per harinya itu yang bisa kita maksimalkan.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Anda punya apa sewa?

DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (MARYADI, S.E., M.M.,):

Sekarang sudah punya Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Di mana?

DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (MARYADI, S.E., M.M.,):

Di Cianjur.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Benar?

DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (MARYADI, S.E., M.M.,):

Betul Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Untuk ayam?

DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (MARYADI, S.E., M.M.,):

Ayam Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Nah terus yang lainnya?

DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (MARYADI, S.E., M.M.,):

Yang...

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kalau itu kan hanya Jawa Barat nih bicaranya Cianjur. enggak mungkin ayamnya dipotong di Cianjur dibawa ke Kalimantan atau dibawa ke mana? Coba saya minta penjelasan kesiapan Anda untuk menopang program Presiden yang akan datang secara singkat dan jelas silakan.

DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (MARYADI, S.E., M.M.,):

Izin Pak. Pak Ketua, kami tambahkan yang disampaikan oleh Dirut Berdikari tadi selain kita mempunyai RPHU di Cianjur, kami sudah lihat Pak kemarin kapasitasnya cukup besar Pak. Nah ini juga kami sudah melakukan

kerja sama dengan RPHU maupun peternak-peternak yang ada di seluruh Indonesia. Jadi ini saat ini juga kami sudah melaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan *stunting* yang dalam hal ini diinisiasi programnya dari Bapanas Pak. Saat ini sudah berjalan dan ini akan kita teruskan Pak untuk kemitraan dengan para peternak ini Pak.

Demikian Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Kemitraan apa sewa?

DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (MARYADI, S.E., M.M.,):

Kemitraan Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Oh karena setahu saya kan Berdikari kan selama ini bilang kemitraan ga taunya sewa ya toh? Termasuk juga misalnya GPS dan lain-lain itu kan masih kebanyakan sewa tempat. Kemudian mengenai kambing atau sapi itu bagaimana programnya? Kan pemerintah akan datang termasuk juga ada program susu, melibatkan Berdikari atau tidak? Atau Berdikari sudah siap apa belum?

DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (MARYADI, S.E., M.M.,):

Izin Pak Ketua. Jadi siang ini kami juga akan melakukan koordinasi dengan PTPN juga dalam rangka penyediaan untuk *dairy* Pak. Nanti kami juga kerja sama dengan PTPN ini Pak lahannya kemudian juga termasuk juga untuk penyediaan makanan ternaknya juga sehingga nantinya adalah ekosistem mulai makanan ternak, kemudian juga penggemukannya, kemudian juga *dairy*-nya juga ini akan disiapkan bersama-sama dengan PTPN Pak, dan ini juga kerja sama dengan *Frisian Flags* juga Pak.

Demikian Pak Bapak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Jadi untuk susu tadi kerja sama PTPN?

DIREKTUR UTAMA PT BERDIKARI (MARYADI, S.E., M.M.,):

Iya Pak.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Perlu Bapak ketahui, nanti tanya sama Dirjen PKH ini, kalau di PTPN itu

kira-kira suhunya berapa? Apa mungkin untuk susu sapi yang memproduksi susu itu di udara yang panas? Kecuali, kalau Anda mengomong oh kerja sama PTPN khusus di Pengalengan itu masih masuk akal karena harus membutuhkan udara yang dingin ya. Kenapa saya tanya gini karena program ini susu sudah dekat loh, sudah mepet ini waktunya dan kita harus tetap mendukung program pemerintah yang baik untuk rakyat.

Bapanas, Bapanas silakan kalau ada.

DIREKTUR UTAMA BAPANAS (H. ARIEF PRASETYO ADI, ST, MT, Ph.D. (hc)):

Terima kasih Ketua hanya izin menyampaikan bahwa kita ini sebenarnya sudah ada Perpres 125 Tahun 2022 mengenai Cadangan Pangan Pemerintah. Jadi yang diperlukan adalah hari ini anggaran. Apabila nanti Pak Mentan dan jajaran sudah melakukan produksi dan sesuai dengan target kita naik, harusnya kita sudah ada *standby buyer.* Jadi saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Pak Mentan, jagung produksi bagus, Dompu, Bima, Gorontalo ya, pada saat itu harganya jatuh. Nah di saat itu kita perlu *cash* untuk itu. Cadangan pangan pemerintah lainnya misalnya daging ruminansia. Daging ruminansia itu ya jangan hanya datang simpan habis. Jadi kita harus punya ketahanan pangan yang lebih baik. Artinya *inventory*-nya dikontrol berapa bulan kita mau tahan Pak Ketua. Kita duduk sama-sama kita rumuskan itu.

Memang ini juga terkait dengan Kementerian BUMN karena ada BUMN di sini dan satu lagi Komisi VI, jadi ini harus disinergikan. Jadi peningkatan produksi dari saudara kita Kementerian Pertanian harus satu paket dengan *offtaker* atau *stand-by buyer* dan itu Cadangan Pangan Pemerintah.

Itu Ketua yang paling penting dari Badan Pangan Nasional untuk dapat di*support* karena selama kita tidak punya *stand-by buyer,* dan juga peralatan pasca panen yang disampaikan Pak Mentan tadi. Merauke produksi 100 misalnya 100 ribu sebelumnya 40 ribu ya kemudian pasca panennya itu juga harus disiapkan, termasuk infrastruktur seperti JT gudang ya *end-to-end* sampai dengan produk ini bisa di *deliver* ke daerah sekitar misalnya sampai ke Timika ke Utara sampai ke Biak dan lain-lain. Jadi Indonesia Timur produksi untuk Indonesia Timur tetapi harus disiapkan infrastrukturnya dan itu harus dari pemerintah Pak karena kalau *private* sektor pasti terlalu berat. Mungkin itu tambahan dari saya.

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terakhir di tempat ini Anda masih mengatakan akan mengajukan usulan Undang-Undang *Waste Food*. Gimana sampai sekarang kok enggak ada kabar beritanya? Malah saya dapat info malah dibalik katanya inisiasi DPR. Tolong dijelaskan.

DIREKTUR UTAMA BAPANAS (H. ARIEF PRASETYO ADI, ST, MT, Ph.D.

(hc)):

Izin Deputi II, Pak Nyoto tolong dijelaskan proses kita paralel antara Perpres dengan yang undang-undang. Pak Nyoto.

DEPUTI II (Dr. Drs. NYOTO SUWIGNYO, MM):

Baik, terima kasih Pak Kepala Badan Pangan Nasional.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan.

Perlu kami sampaikan bahwa untuk penyusunan draf Rancangan Undang-undang *Food Lose and Food Waste* sebagaimana diamanatkan pada pertemuan beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah bulan September 2023, itu sudah kami laporkan pada saat ada pertemuan FGD bersama DPR di Hotel..., di (**suara tidak jelas**) kemarin. Nah kemudian di dalam penyampaian tersebut kami jelaskan bahwa untuk proses penyusunan rancangan undang-undang tentu sangat membutuhkan prakarsa yang cukup panjang waktunya, sehingga kami menyampaikan di dalam laporan tersebut sambil menunggu penyiapan Naskah Akademis Undang-undang terkait *food lost food waste*. Kami menyiapkan rancangan terkait dengan susut pangan dan sisa pangan dalam bentuk rancangan Perpres. Nah, kegiatan ini sudah kami siapkan urgensinya dan sementara proses sudah selesai penyusunan naskah urgensi dan kami sudah ajukan kepada Bapak Presiden untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Sementara itu untuk penyiapan naskah akademis terkait rancangan undang-undang kami juga masih terus berjalan dalam rangka penyiapan naskahnya dan sambil menunggu perkembangan-perkembangan lebih lanjut.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Terima kasih.

Bapak-Ibu yang ramai hormati.

F-PAN (Dr. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Mau ngomong? Mau ngomong?

F-PAN (Dr. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M):

Iya sedikit.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Iya silakan.

F-PAN (Dr. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M):

Terima kasih. Terima kasih Ketua.

Pak Arief, mumpung ada Pak Arief, Pak Menteri, dan Pak Wamen tadi disebut Bima dan Dompu kebetulan di Dapil saya. Memang regulasi jagung selama ini di sana itu Pak Arief. Saya tahu Pak Arief sering sekali melakukan cek ya, tetapi setelah Pak Arief cek itu realisasinya itu tidak akan terlaksana dengan baik. Saya hanya ingin mengingatkan kembali saja bahwa ke depan ini harus maksimal regulasi yang bagus dan yang paling penting memberikan kepuasan kepada petani. Ada keinginan dan *offtaker* tadi itu loh ada keinginan mereka untuk menanamlah. Jangan sampai mereka semangat menanam tetapi regulasi harganya enggak jelas dan Pak Menteri. Saya selalu ditanya di kampung itu, “Kenapa nih Pak, kok enggak ada” Itu basah kering itu saya susah menjawab karena kan berbeda-beda terus dan realisasinya.

Saya kira itu Pak Arief, Pak Menteri dan Pak Wamen, Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

Ya dari dialog, diskusi, masukan, saran baik dari Komisi IV maupun dari pemerintah sebelum acara ini kita akhiri kita akan membacakan rancangan kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Silakan Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Izin Ketua sebelum membacakan, saya mau ngomong tentang Undang-Undang Sumber Daya Air itu 17/2019 kalau tidak salah itu tidak ada Kementerian Pertanian sama sekali di dalamnya, hampir semuanya itu PUPR. Artinya ini kan menjadi PR kita, enggak nyambung sama sekali apa yang sudah dilakukan. Sementara ini kita tahu di lapangan yang dilakukan oleh teman-teman di PUPR tidak, bukannya kita menafikan, enggak, tetapi yang dibutuhkan oleh petani itu nyampe airnya ke petani. Kalau misalnya tidak ada sama sekali di situ urusan perairan itu apa Kementerian Pertanian ya percuma, yang tadi dikatakan oleh Pak Menteri tadi percuma. Jadi enggak ada nyambungnya.

Oleh karena itu memang Pak Ketua, saya apa ya kita harus serius untuk kalau kita mau benar-benar mau berdaulat pangan ya memang harus ada air enggak mungkin enggak ada. Jadi memang harus kita ada strategi \yang jitulah ya yang gimana supaya masyarakat atau petani ini benar-benar bisa terakses airnya. Ini PR kita nanti kita akan diskusikan lebih dalam lagi.

Baik, saya akan bacakan kesimpulan rapat kita kali ini. Poin pertama,

Bapak-Ibu mohon untuk diperhatikan.

1. Komisi IV DPR RI mendengarkan Penjelasan Menteri Pertanian atas capaian opini Wajar Dengan Pengecualian serta Penjelasan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
   a. Realisasi pendapatan 2023 sebesar Rp688.236.858.066 (*enam ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah*) atau capaian 126,15% dari target pendapatan;
   b. Realisasi belanja 2023 sebesar Rp14.315.456.911.043 (*empat belas triliun tiga ratus lima belas miliar empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus sebelas ribu empat puluh tiga rupiah*) atau mencapai 96,67% dari alokasi anggaran.

   Para Anggota?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Setuju.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Pak Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

Poin 2,

2. Komisi IV DPR RI mendengarkan Penjelasan Menteri Pertanian atas Pagu Anggaran Kementerian Pertanian dengan RKA Kementerian Pertanian Tahun 2024 berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-612/MK.02/2024 dan Nomor B-480/D.08/PP.04.03/07/2024 tanggal 19 Juli 2024, Hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.905.979.021.000 (*tujuh triliun sembilan ratus lima miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua puluh satu ribu rupiah*). Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan membahas lebih lanjut, lebih mendalam bersama Eselon I Kementerian Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Para Anggota?

F-PAN (Dr. H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M):

Setuju.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Pak Menteri?

(RAPAT: SETUJU)

Poin 3.

3. Komisi IV DPR RI mendengarkan Penjelasan Kementerian Pertanian mengenai usulan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp68 triliun.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, M.M.):

Ketua, saya ada masukkan jangan hanya "mendengarkan" tapi "menyetujui". Kalau hanya mendengarkan, hanya pemaparan saja, tapi harus ada tekanan politik dari Komisi IV bahwa kita menyetujui usulannya gitu. Teknisnya nanti tentu ya Kementerian Keuangan sama Bappenas.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA):

Kalau kita menyetujui, kita belum tahu apa yang akan diprogramkan. Setelah menyetujui, nantikan ada mendengarkan, kemudian nanti di Eselon I dibahas pada waktu Raker nanti kan masih ada Raker lagi kita satu kali untuk dilaporkan ke Badan Anggaran, ya itu saja. Jangankan 68 triliun, 100 triliun juga kalau untuk kebutuhan pangan supaya jangan impor lagi saya setuju.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Betul dong, betul lah.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA):

Ya ya Pak Menteri ya.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Biar enggak sedih itu para petani dan kita enggak susah nyari makanan.

Setuju Bapak-Ibu? Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Pak Ketua, tapi gini mungkin kan Pak Ketua yang ahli dalam membuat narasi dengan Ibu Ketua. Ini intinya gini, kalau ini tidak dipenuhi, enggak mungkin itu ada swasembada dan siapkan untuk impor sebesar-besarnya gitu. Enggak, lebih baik kita tegas di sini. Swasembada kan mimpi kita swasembada di awal tetapi anggarannya Rp7 triliun. Jadi..., untuk mendukung program swasembada pangan nasional, di atas untuk mendukung impor pangan nasional Rp7 triliun, tapi jangan ditulis Bu Ketua, sudah diketuk iya.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA):

Enggak masalahnya gini masalahnya gini, kasih 23 50 juta ton, kasih turun lagi tetap 50 juta ton, dikasih 14 koma sekian tetap 50 juta ton.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Kalau begitu lebih baik dinolkan supaya negara untung.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA):

Iya tercapai enggak, kan begitu ya.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Makasih setuju.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA):

Ulangi lagi bacanya.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

3. Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian mengenai usulan tambahan anggaran tahun 2025, sebesar 68 triliun, untuk mendukung program swasembada pangan nasional.

Para Anggota?

F-PKS (Dr. H. HERMANTO, S.E., M.M.):

Komanya dikurangin itu Bu, koma, nah itu.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, terima kasih Pak Hermanto Profesor. Pak Menteri?

(RAPAT:SETUJU)

Poin 4.

4. Komisi IV DPR RI mendengarkan Penjelasan Menteri Pertanian mengenai Pagu Anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.870.216.618.000 (*satu triliun delapan ratus tujuh puluh miliar dua ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:
   a. DAK Fisik sebesar Rp1.645.366.618.000 (*satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah*); dan

b. DAK Non Fisik sebesar Rp224.850.000.000 (*dua ratus dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah*).

Para Anggota?

Pak Menteri?

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Setuju Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV (Dr. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

(RAPAT: SETUJU)

Sudah selesai, terima kasih. Silakan Ketua.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA):

Anggota yang terhormat,

Berarti draf kesimpulan ini kita sudah semua setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Sebelum kami menutup rapat kerja hari ini, kami persilakan Menteri Pertanian untuk menyampaikan kata penutup dalam rapat kerja hari ini. Sesuai jamnya tadi kan kita sepakati 13.35 WIB selesai sedikit lagi.

MENTERI PERTANIAN RI (Dr. Ir. H. ANDI AMRAN SULAIMAN, M.P.):

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Wakil Ketua Komisi IV, seluruh Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati, saya banggakan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya sektor pertanian selama ini. Semoga ke depan pertanian semakin baik. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-PDIP (SUDIN, S.E./KETUA):

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini. Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan kekhilafan. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin*. Rapat kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.25 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

ULFA NURFAJAR
NIP. 197401251993022001